

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Krisis perbankan yang melanda Indonesia pada tahun 1998 bukan sebagai akibat merosotnya nilai tukar rupiah, melainkan karena belum berjalannya praktek Good Corporate Governance (GCG) di kalangan perbankan. Lemahnya implementasi sistem tata kelola perusahaan atau yang biasa dikenal dengan istilah Corporate Governance merupakan salah satu faktor penentu parahnya krisis yang terjadi di Asia Tenggara (*The World Bank, 1998, dalam Oktapiyani, 2009*). Terjadinya pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, rendahnya praktek manajemen resiko, tidak adanya transparansi terhadap informasi keuangan nasabah, dan adanya dominasi para pemegang saham dalam mengatur operasional perbankan menyebabkan rapuhnya industri perbankan nasional.

Mulai saat itulah tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) menjadi pilar perbaikan industri perusahaan khususnya industri perbankan. Dimulai dengan jatuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh tidak patuhnya manajemen perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG. Dengan melaksanakan konsep GCG, diharapkan tercipta citra lembaga yang dapat dipercaya. Artinya ada keyakinan bahwa bisnis perbankan

dikelola dengan baik sehingga dapat tumbuh secara sehat, kuat dan efisien. Sebagai sebuah lembaga perbankan yang dipercaya oleh Pemerintah dalam mengelola dana masyarakat, Manajemen sadar bahwa kepercayaan publik disamping tergantung pada kinerja dan kemampuan Bank dalam mengelola risiko, juga diperlukan adanya sikap profesionalisme, independensi, integritas dari para pengurus serta transparansi atas informasi yang berkaitan dengan kondisi keuangan maupun non-keuangan kepada Publik, namun tetap memelihara dan memenuhi ketentuan kerahasiaan Bank sesuai dengan peraturan perbankan yang berlaku.

Bisnis Indonesia menyelenggarakan diskusi ahli mengenai Aplikasi Good Corporate Governance (GCG) Perbankan, dengan narasumber Deputy Gubernur BI Siti Fadrijah serta melibatkan 20 bankir dari bank BUMN, swasta maupun asing di Jakarta. Persoalan GCG di industri perbankan tetap menjadi masalah krusial yang harus diperhatikan setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam industri itu. Terkait dengan diskusi tersebut, berikut artikel ekonom Bisnis, Rofikoh Rokhim. (sumber : Indonesian Corporate Governance Banking Watch; 5 April 2011 "Mengapa GCG bagi bank begitu penting?"; Artikel Ekonomi)

Krisis ekonomi membuka borok praktik buruk perbankan. Krugman (1998) menyebutnya bahwa krisis ekonomi di Asia-termasuk Indonesia-tidak lebih karena praktik buruk pengelolaan industri perbankan. Hal itu terjadi karena liberalisasi perbankan yang tidak disertai sistem pengawasan dan rambu-rambu pengelola yang baik. Di Indonesia, tidak lain adanya Pakto 88 yang membuat bank tumbuh dengan modal rendah (Rp10 miliar), bankir karbitan dengan pengalaman minim, serta tata kelola dan pengawasan yang buruk. Hal itu

membuat sebagian besar perbankan Indonesia mengalami gangguan mendadak ketika krisis ekonomi tiba. Selain karena pengelolaan banknya sendiri yang jelek, memburuknya kinerja korporasi, yang menjadi pelanggan, juga turut semakin membuat perbankan dalam kondisi sulit. Korporasi di Indonesia masih bertumpu pada kredit perbankan, ketika dunia usaha melesu, kemampuan pengembalian kredit korporasi melemah. Ujungnya, perbankan sulit untuk bergerak, kredit macet bermunculan dan pembukukan kinerja bank negatif. Akibatnya, GCG mendesak untuk direalisasikan. Mengapa? Indonesia adalah negara yang berbasis pada sistem keuangan perbankan seperti layaknya sistem keuangan di negara berkembang lainnya.

Bank masih merupakan sumber pendanaan memfasilitasi kredit modal kerja dan investasi, terutama untuk perusahaan baru baik skala kecil, menengah dan besar, selain untuk kegiatan ekspansi industri. Intinya, bank merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi melalui pembiayaan yang diberikan (King dan Levine, 1993). Oleh karena itu, dengan adanya pengelolaan perbankan yang baik melalui aplikasi GCG maka hal ini akan meningkatnya efisiensi perbankan dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi meningkat, mengingat perbankan mempunyai sumbangan besar dalam perekonomian (Levine 1997, 2004). Jika perbankan efisien maka hal ini akan membawa dampak positif bagi peningkatan keuntungan bank, besaran dana intermediasi bank, membaiknya kualitas pelayanan kepada nasabah, mendorong kemandirian operasional, kesehatan perbankan serta yang paling penting keuntungan kepada shareholder dan stakeholder (Berger, Hunter, dan Timme, 1993). Mengingat begitu pentingnya perbankan dalam sistem keuangan suatu negara maka praktik perbankan yang benar sangat diharapkan melalui

aplikasi GCG sesuai dengan standar internasional dan nasional, sangat mendesak dilakukan otoritas moneter maupun perbankan sendiri.

Penerapan GCG perbankan dianggap unik karena bank memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan keuangan jenis lain maupun perusahaan non-keuangan. Keunikan perbankan terutama bila dilihat dari neraca yaitu aset perbankan rata-rata adalah kredit yang sebagian besar bersifat jangka panjang, sedangkan sisi liabilities adalah tabungan dan deposito yang memiliki sifat jangka pendek. Pengelolaan yang tidak hati-hati akan menyebabkan terjadinya mismatch antara aktiva dan pasiva. Terjadinya *missmatch* dapat menyebabkan pembukuan negatif bagi bank.

Khusus untuk pengelolaan kredit maka kredit yang disalurkan tanpa hati-hati akan memunculkan kualitas kredit yang buruk dan akan membawa masalah bagi kesehatan perbankan. Kredit yang buruk, terutama terjadi karena kurang kehati-hatian manajemen (direksi dan komisaris) dalam mengelolanya dan tidak tertutup kemungkinan karena campur tangan pemilik dalam penyaluran kredit kepada pihak terkait. Penyaluran kredit kepada pihak terkait dapat bersifat positif jika keterkaitan itu meminimalkan risiko dan sebaliknya akan bersifat negatif jika justru menambah risiko gagal bayar akibat terjadinya moral hazard. Bagaimanapun, GCG menjadi kental ketika ada persinggungan kepentingan antara pemilik dan manajemen. Sementara itu, kredit yang buruk dapat disimpan secara akuntansi dalam neraca perbankan untuk periode lama-mengingat sifatnya jangka panjang-sehingga perbankan mengalami kecenderungan *vulnerable*. Meredam masalah dalam pengelolaan perbankan yang vital bagi perekonomian itu, maka pengelolaan perbankan berdasarkan prinsip-prinsip GCG tidak dapat dielakkan

lagi. Adapun prinsip-prinsip dasar GCG secara global adalah transparansi yang menyangkut keterbukaan informasi dan proses dalam pengambilan keputusan.

Akuntabilitas tentang kejelasan fungsi dan tanggung jawab agar pengelolaan bank efektif. Tanggung jawab dalam mematuhi perundang-undangan dan prinsip pengelolaan. Independensi pengelolaan yang profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder.

Perwujudan dari pemikiran tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila Bank dalam melakukan aktivitasnya senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi lima prinsip dasar. Pertama, *transparansi (transparency)*, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Kedua, *akuntabilitas (accountability)* yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, *pertanggung jawaban (responsibility)* yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, *independensi (independency)* yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh /tekanan dari pihak manapun. Kelima, *kewajaran (fairness)* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (The World Bank, 1998, dalam Oktapiyani, 2009).

Pemerintah dalam menjalankan kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 telah melakukan penutupan 64 bank, pengambilalihan 7 bank, rekapitulasi 9 bank, dan menginstruksikan 73 bank untuk mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitulasi sehingga pada tahun 2001 jumlah bank yang tersisa sebanyak 141 bank. Selain melaksanakan kebijakan reformasi perbankan, pada tahun 2004 pemerintah melalui Bank Indonesia (BI) melakukan pembenahan fundamental terhadap perbankan nasional yaitu dengan dikeluarkannya API (Arsitektur Perbankan Indonesia)(dalam Nirmalasari, Skripsi, hal 2.2009)

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arahan, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. Di dalamnya terdapat enam pilar utama yang merupakan sasaran yang ingin dicapai, salah satunya adalah menciptakan *corporate governance* untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional. Tidak hanya berhenti sampai disitu, untuk menunjukkan keseriusannya terhadap isu CG, pada tanggal 30 Januari 2006 Bank Indonesia (BI) mengeluarkan paket kebijakan perbankan yang lebih dikenal dengan istilah Pakjan 2006, yang isinya mengenai peraturan baru tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance*, bagi bank umum berupa Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Isu GCG muncul karena terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Pemisahan ini memberikan kewenangan kepada pengelola (manajer/direksi) untuk mengurus jalannya perusahaan, seperti mengelola dana dan mengambil keputusan perusahaan atas nama pemilik. Salah

satu wujud konkrit dari pelaksanaan praktek Good Corporate Governance adalah dengan adanya penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan Bank Umum di Indonesia. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Praktek Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dapat diketahui bahwa bank mempunyai peranan yang sangat besar dalam kehidupan perekonomian, sebagai pelaksana kebijakan moneter dan menghimpun dana dalam jumlah yang besar dari masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip transparansi pada bank menjadi peranan yang sangat penting dan patut untuk menjadi perhatian baik bagi stakeholders, komisaris, dan manajer (direksi), maupun pembina dan pengawas bank. Sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 mewajibkan Bank Umum yang ada di Indonesia untuk melaksanakan praktek Good Corporate Governance terutama dalam penerapan Prinsip Transparansi dalam pengelolaan bank. Bank Indonesia telah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang secara langsung ataupun tidak langsung mendukung penerapan Good Corporate Governance bagi dunia perbankan. Dalam pengelolaan bank umum, penerapan prinsip transparansi harus dapat dilaksanakan demi terlaksananya Good Corporate Governance benar-benar dapat dilaksanakan dengan konsisten demi tercapainya ketahanan dan daya saing bank serta tercapainya tujuan bank dalam jangka panjang dengan mengatasi faktor-faktor penghambat terlaksananya prinsip transparansi pada bank. Inti dari Good Corporate Governance adalah moral dan etika yang dibarengi dengan penerapan hukum.

Penerapan *Good Corporate Governance* ini diharapkan dapat memperbaiki citra perbankan yang sempat buruk, melindungi kepentingan *stakeholders* serta

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan system perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *good corporate governance* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap kinerja perbankan, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi resiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri.

Penelitian mengenai hubungan *good corporate governance* dan kinerja perusahaan telah banyak dilakukan, baik penelitian yang menggunakan index penilaian *corporate governance* maupun struktur (mekanisme) *corporate governance*. Darmawati, dkk (2005) meneliti hubungan antara *corporate governance* dan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan hasil survey IICG dan majalah SWA tentang implementasi GCG dalam perusahaan tahun 2001 dan 2002 yaitu CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) sebagai proksi variabel *corporate governance*. Sedangkan kinerja perusahaan diproksi dengan kinerja keuangan (*Return on Equity/ROE*) dan nilai perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *corporate governance* secara statistik signifikan mempengaruhi ROE namun tidak mempengaruhi nilai perusahaan.

Sukamulja (2004) meneliti dampak *good corporate governance* terhadap kinerja. Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan *good corporate governance* tidak berpengaruh terhadap kinerja yang tercermin dari nilai pasar perusahaan dilihat dari segi profitabilitas, umur perusahaan dan ukuran perusahaan. Meskipun demikian, penelitian sebelumnya menemukan perbedaan dalam praktik tata kelola perusahaan di berbagai industri, khususnya di pasar negara berkembang.

Dari penelitian yang ada selama sepuluh tahun terakhir setelah krisis di Asia, berbagai penelitian lebih banyak difokuskan pada perusahaan non-keuangan dalam rangka untuk mengamati praktik tata kelola perusahaan (Wallace dan Zinkin, 2005). Penelitian mengenai mekanisme tata kelola perusahaan perbankan dilakukan oleh Zulkifli dan Samad (2007). Dalam penelitiannya mengkaji perbedaan antara tata kelola perusahaan perbankan dengan non-keuangan. Bukti menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara mekanisme tata kelola perusahaan untuk sektor keuangan seperti perusahaan perbankan dan perusahaan nonkeuangan. Bukti lain juga menunjukkan adanya suatu masalah *moral hazard* dalam operasional perusahaan perbankan seperti *transfer pricing*, *asset stripping*, mempekerjakan anggota keluarga, dan alokasi kredit yang tidak semestinya yang menyebabkan dampak negatif pada kinerja bank (Zulkifli dan Samad, 2007 dalam Praptiningsih, 2009). Penelitian skripsi tentang pengukuran tata kelola perusahaan dan kinerja dalam sektor perbankan yang secara khusus menentukan mekanisme tata kelola perusahaan dengan hipotesis menemukan bahwa Mekanisme Pemantauan Kepemilikan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. Kedua, Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal menunjukan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan kecuali hanya satu ukuran dewan direksi yang menunjukan hubungan yang positif namun tidak signifikan. Ketiga, Mekanisme Pemantauan Regulator melalui persyaratan cadangan dan atau Rasio Kecukupan Modal (CAR) menunjukan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan. Keempat, Mekanisme Pemantauan Pengungkapan melalui auditor eksternal *Big 4* menunjukan hubungan yang positif signifikan terhadap kinerja perbankan (Irmala Sari, 2010. Hipotesis Skripsi). Oleh

karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengkaji lebih dalam pengukuran tata kelola dan kinerja perusahaan sektor perbankan secara khusus, yang ditentukan oleh mekanisme tata kelola perusahaan seperti Mekanisme Pemantauan Kepemilikan, Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal, Mekanisme Pemantauan Regulator, dan Mekanisme Pemantauan Pengungkapan. Dari beberapa mekanisme tata kelola tersebut dibagi menjadi beberapa variabel yang nantinya akan dikaji dalam penelitian ini diantaranya Mekanisme Pemantauan Kepemilikan terdiri dari variabel pemegang saham pengendali (*large shareholders*), kepemilikan asing (*foreign ownership*) dan kepemilikan pemerintah (*government ownership*). Mekanisme Pemantauan Pengendalian Intern terdiri dari variabel ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, dan komisaris independen. Mekanisme Pemantauan Regulator tercermin melalui variabel Rasio Kecukupan Modal (CAR). Mekanisme Pemantauan Pengungkapan terdiri dari variabel auditor eksternal (*Big 4*), yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan memakai sumber data yang berbeda (yang menjadi catatan penulis sebelumnya) untuk mencari perbandingan atau persamaan kewajaran dari penelitian sebelumnya. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini mengambil judul,

“PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE
TERHADAP KINERJA PERBANKAN NASIONAL (STUDI PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BANK
INDONESIA)”

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara kinerja perusahaan sektor perbankan secara khusus dan mekanisme tata kelola perusahaan meliputi Mekanisme Pemantauan Kepemilikan, Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal, Mekanisme Pemantauan Regulator, dan Mekanisme Pemantauan Pengungkapan.
- Dengan menggunakan data sampel yang sama tetapi sumber dan time series yang berbeda, apakah terdapat perbedaan hasil dengan penelitian sebelumnya.

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.3.1 Tujuan Penelitian

Untuk menguji kembali pengukuran tata kelola dan kinerja perusahaan perbankan yang ditentukan oleh mekanisme tata kelola perusahaan meliputi Mekanisme Pemantauan Kepemilikan, Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal, Mekanisme Pemantauan Regulator, dan Mekanisme Pemantauan Pengungkapan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan ilmu akuntansi pada umumnya, serta khususnya yang berkaitan dengan *good corporate governance* terutama dalam bidang perbankan.

2. Kegunaan Praktis

2.1 Bagi Manajemen Institusi

Sebagai saran dan masukan yang dapat dipergunakan bagi manajemen institusi sebagai bahan dan referensi dalam rangka menetapkan kebijakan maupun langkah strategik

2.2 Bagi Investor

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan investasi khususnya dalam menilai kinerja suatu bank

2.3 Bagi Masyarakat Umum

Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu dasar untuk menilai tingkat kesehatan perbankan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan

3. Bagi Peneliti/Pembaca

Sebagai bahan kajian dan referensi untuk menambah wawasan maupun untuk

pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam sistematika penulisan akan diuraikan secara garis besar isi dari setiap bab, agar dapat memberikan sedikit gambaran mengenai isi skripsi ini diantaranya:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menguraikan garis besar mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam skripsi ini, yang meliputi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang memperkuat penelitian yang akan dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta hipotesis sebagai hasil sementara dari proposal pra-skripsi.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ketiga akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini. Sub bab dari metode penelitian ini adalah variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini dijelaskan mengenai hasil penelitian yang membahas mengenai deskripsi objek penelitian, analisis data serta pembahasan hasil penelitian dan interpretasi hasil

Bab V : KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi kesimpulan dari hasil keseluruhan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan yang ada dalam penelitian, dan saran-saran perbaikan yang diharapkan agar dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN TERDAHULU

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam mengkaitkan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank, terdapat satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian sasaran organisasi bank serta kinerjanya, yaitu manajemen atau pengurus bank. Pencapaian tujuan dan kinerja bank tidak terlepas dari kinerja manajemen itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, hubungan antara manajemen suatu bank dengan pemilik bank akan dituangkan dalam suatu kontrak (*performance contract*). Hubungan kontrak antara pemilik dan manajemen tersebut sejalan dengan *Agency Theory* (Jensen dan Meckling, 1976).

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedang para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Karena perbedaan kepentingan ini masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang sebesar-besarnya dan secepatnya atas investasi yang salah satunya dicerminkan dengan kenaikan porsi deviden dari saham yang dimiliki. Manajemen menginginkan kepentingannya diakomodir dengan pemberian kompensasi gaji/ bonus/ insentif/ remunerasi yang “memadai” dan sebesar-besarnya atas kinerjanya. Prinsipal

menilai prestasi Agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian deviden. Makin tinggi laba, harga saham dan makin besar deviden, maka Agen dianggap berhasil/ berkinerja baik sehingga layak mendapat insentif yang tinggi.(sumber: www.scribd.com/doc/52041643/6/Teori-Keagenan-Agency-Theory yang di unduh pada Juli 12 03:30WIB)

Agency relationship didefinisikan sebagai kontrak dimana satu atau lebih orang (disebut *owners* atau pemegang saham atau pemilik) menunjuk seorang lainnya (disebut agen atau pengurus/manajemen) untuk melakukan beberapa pekerjaan atas nama pemilik. Pekerjaan tersebut termasuk pendelegasian wewenang untuk mengambil keputusan. Dalam hal ini manajemen diharapkan oleh pemilik untuk mampu mengoptimalkan sumber daya yang ada di bank tersebut secara maksimal. Bila kedua pihak memaksimalkan perannya (*utility maximizers*), cukup beralasan apabila manajemen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan pemilik. Hal ini sangat beralasan sekali karena pada umumnya pemilik memiliki *welfare motives* yang bersifat jangka panjang, sebaliknya manajemen lebih bersifat jangka pendek sehingga terkadang mereka cenderung memaksimalkan profit untuk jangka pendek dengan mengabaikan *sustainability* keuntungan dalam jangka panjang. Untuk membatasi atau mengurangi kemungkinan tersebut, pemilik dapat menetapkan insentif yang sesuai bagi manajemen, yaitu dengan mengeluarkan biaya monitoring dalam bentuk gaji. Dengan adanya *monitoring cost* tersebut manajemen akan senantiasa memaksimalkan kesejahteraan pemilik, walaupun keputusan manajemen dalam praktek akan berbeda dengan keinginan pemilik (Jensen dan Meckling, 1976).

Ada tiga asumsi yang melandasi teori keagenan (Darmawati,dkk,2005) yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian, dan asumsi informasi

1. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia mempunyai sifat mementingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasional (*bounded rationality*) dan tidak menyukai resiko .
2. Asumsi keorganisasian menekankan tentang adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria efektivitas, dan adanya asimetri informasi antara *prinsipal* dan *agent*.

3. Asumsi informasi mengemukakan bahwa informasi dianggap sebagai komoditi yang dapat dijual-belikan.

Corporate governance sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dengan penekanan khusus pada mekanisme legal yang mencegah dilakukannya ekspropriasi atas pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas. *Corporate governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan komisaris, para pemegang saham dan *stakeholders* lainnya. *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk menentukan teknik monitoring kinerja (Deni, Khomsiyah dan Rika, 2004 dalam Oktapiyani, 2009).

2.1.2 Good Corporate Governance

2.1.2.1 Definisi

Menurut Sidharta dan Cynthia (dalam Oktapiyani, 2009) istilah *Good Corporate Governance* secara umum dikenal sebagai suatu sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti kreditur, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas. Prinsip *good corporate governance* ini dapat digunakan untuk melindungi pihak-pihak minoritas dari pengambil alih yang dilakukan oleh para manajer dan pemegang saham dengan mekanisme legal.

Good Corporate Governance pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, Proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (*stakeholders*) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan. Good Corporate Governance dimasukkan untuk mengatur hubungan-hubungan ini dan mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan signifikan dalam strategi perusahaan dan untuk memastikan bahwa kesalahan-

kesalahan yang terjadi dapat di perbaiki dengan segera. Pengertian ini dikutip dari buku *Good Corporate Governance* pada badan usaha manufaktur, perbankan dan jasa keuangan lainnya (2008:36), Rogers W' O Okot Uma dari common wealt secertariat london (ndraha 2003:629) mendefinisikan Good Governance sebagai, “compressing the prossesing and structure guides political and sosial economic relationship, with patricular reference to commitment to democratic values, norms and honest business” atau mempersingkat proses struktur yang mengatur hubungan ekonomi, sosial dan politis dengan acuan tertentu untuk memenuhi nilai-nilai demokratis, norma-norma dan bisnis yang sehat. (dikutip dari : <http://therealking-yohanes.blogspot.com/2010/05/pengertian-good-corporate-governance.html>).

2.1.2.2 Prinsip *Good Corporate Governance*

Salah satu pilar penting dalam *good corporate governance* di perbankan adalah komitmen penuh dari seluruh jajaran pengurus bank hingga pegawai yang terendah untuk melaksanakan ketentuan tersebut. Maka dari itu seluruh karyawan wajib untuk menjunjung tinggi prinsip *good corporate governance*. Dalam penerapannya, OECD menyusun prinsip-prinsip yang mengatur *good corporate governance*, diantaranya: seperti *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*,

Independency dan *Fairness* (TARIF) seperti halnya sebagai berikut:

1. *Transparency* (Transparansi)

Keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan

2. *Accountablity* (Akuntabilitas)

Merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Adanya kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan bank terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.

4. *Independency* (Independensi)

Pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/ tekanan dari pihak manapun.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menekankan bahwa semua pihak baik pemegang saham minoritas maupun asing harus diperlakukan sama atau setara.

Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* minimal harus diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi;
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank;
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal;
- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar;
- f. Rencana strategis Bank;
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Konsep di atas tidak jauh berbeda dengan tujuan penerapan *good corporate governance* dalam perbankan, yaitu menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) sebagai bentuk pelaksanaan dalam mewujudkan perbankan yang sehat (Priambodo dan Supriyatno, 2007)

2.1.2.3 Manfaat dan Tujuan *Good Corporate Governance*

GCG dapat memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif, sehingga dapat tercipta mekanisme *checks and balance* di perusahaan. Menurut *Forum Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) ada beberapa manfaat yang dapat kita ambil dari penerapan GCG yang baik, antara lain:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *Shareholders's value* dan deviden

Pelaksanaan *Corporate Governance* yang baik adalah merupakan langkah penting dalam membangun kepercayaan pasar (*market confidence*) dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil, bersifat jangka panjang. Menurut *Bassel Committee on Banking Supervision*, tujuan dan manfaat *good corporate governance* antara lain sebagai berikut:

1. Mengurangi *agency cost*, biaya yang timbul karena penyalahgunaan wewenang, ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah timbulnya suatu masalah.
2. Mengurangi biaya modal yang timbul dari manajemen yang baik, yang mampu meminimalisir resiko.
3. Memaksimalkan nilai saham perusahaan, sehingga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata publik dalam jangka panjang
4. Mendorong pengelolaan perbankan secara profesional, transparan, efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian dewan komisaris. Direksi dan RUPS

5. Mendorong dewan komisaris, anggota direksi, pemegang saham dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku.
6. Menjaga *Going Concern* perusahaan

2.1.2.4 Penerapan *Good Corporate Governance*

Keberhasilan penerapan GCG juga memiliki prasyarat tersendiri. Ada dua faktor yang memegang peranan, yakni faktor eksternal dan internal.

1. Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan GCG.

Diantaranya:

- a. Terdapatnya sistem hukum yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b. Dukungan pelaksanaan GCG dari sektor publik/lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean governance* yang sebenarnya.
- c. Terdapatnya contoh pelaksanaan GCG yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan GCG yang efektif dan professional. Dengan kata lain semacam *benchmark* (acuan)
- d. Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan GCG dimasyarakat. Ini penting karena melalui sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi GCG secara sukarela.
- e. Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi GCG terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja. Bahkan dapat dikatakan bahwa perbaikan lingkungan publik sangat mempengaruhi kualitas dan rating perusahaan dalam implementasi GCG.

2. Faktor Internal

Maksud faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek GCG yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor yang dimaksud antara lain:

- a. Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan GCG dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan
- b. Berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai GCG.
- c. Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar GCG
- d. Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e. Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan public dapat memahami dan mengikuti setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

Menurut IICG (*The Indonesian Institute for Corporate Governance*) dalam Oktapiyani, 2009, terdapat 7 dimensi/ konsep penerapan GCG, yang diambil dari panduan yang telah ditetapkan oleh OECD dan KNKCG. Tujuh dimensi tersebut yaitu:

- a. Komitmen terhadap tata kelola perusahaan-sistem manajemen yang mendorong anggota perusahaan menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik
- b. Tata kelola dewan komisaris-sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota dewan komisaris dalam membantu penyelenggaraantata kelola perusahaan yang baik.
- c. Komite-komite fungsional-sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota komite-komite fungsional dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.

- d. Dewan direksi-sistem manajemen yang memungkinkan optimalisasi peran anggota dewan direksi dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik.
- e. Transparansi dan Akuntabilitas-sistem manajemen yang mendorong adanya pengungkapan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya, tepat waktu, jelas, konsisten dan dapat diperbandingkan tentang kegiatan perusahaan
- f. Perlakuan terhadap pemegang saham-sistem manajemen yang menjamin perlakuan yang setara terhadap pemegang saham dan calon pemegang saham
- g. Peran pihak berkepentingan lainnya (stakeholders)- sistem manajemen yang dapat meningkatkan peran pihak berkepentingan lainnya.

Agar tercipta kondisi yang mendukung implementasi GCG, salah satu tugas yang menjadi tanggung jawab pemerintah dan otoritas terkait adalah penerbitan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan dilaksanakannya GCG secara efektif. Selain itu bank sebagai subjek GCG perlu menerapkan standar akuntansi dan standar audit yang sama dengan standar yang berlaku umum. Dan ini harus melibatkan auditor eksternal dalam proses auditnya, sehingga diperoleh ukuran yang sama dengan ukuran yang berlaku di tempat lain.

Berdasarkan *Bassle Committee on Banking Supervision*, 1999 (dalam Oktapiyani, 2009) menerangkan bahwa setidaknya terdapat tujuh standar yang harus digunakan dalam menerapkan GCG secara efektif pada industri perbankan, antara lain:

1. Bank harus menerapkan sasaran strategis dan serangkaian nilai perusahaan yang dikomunikasikan ke setiap jenjang jabatan pada organisasi
2. Bank harus menetapkan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan pada organisasi.
3. Bank harus memastikan bahwa pengurus bank memiliki kompetensi yang memadai dan integritas yang tinggi. Serta memahami peranannya dalam mengelola bank yang sehat, dan independen terhadap pengaruh pihak eksternal

4. Bank harus memastikan keberadaan pengawasan yang tepat oleh direksi
5. Bank harus mengoptimalkan efektifitas peranan fungsi auditor eksternal dan satuan kerja audit intern.
6. Bank harus memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah konsisten dengan nilai etik, sasaran, strategi, dan lingkungan pengendalian bank
7. Bank harus menerapkan praktek-praktek transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada publik.

2.1.3 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan baik yang melakukan kontrol/ pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi berjalannya sistem *governance* dalam sebuah organisasi (Walsd dan Seward, 1990 dalam Arifin, 2005). Untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *prinsipal* dan *agent* akibat adanya pemisahan pengelolaan perusahaan, diperlukan suatu cara efektif untuk mengatasi masalah ketidakselarasan kepentingan tersebut. Menurut Boediono (2005), mekanisme *corporate governance* merupakan suatu sistem yang mampu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan serta pihak-pihak yang terlibat didalamnya, sehingga dapat digunakan untuk menekan terjadinya masalah keagenan.

Dalam paper *Bassel Committee on Banking Supervision-Federal Reserve*, telah menyoroti fakta bahwa strategi dan teknik yang didasarkan pada prinsip-prinsip OECD (Brigham dan Erhardt, 2005), yang merupakan dasar untuk melaksanakan tata kelola perusahaan meliputi:

- a. Nilai-nilai perusahaan, kode etik dan perilaku lain yang sesuai standar dan sistem yang digunakan untuk memastikan kepatuhan mereka
- b. Pembentukan mekanisme untuk interaksi dan kerjasama di antara dewan direksi, manajemen senior, dan para auditor

- c. Sistem pengendalian internal yang kuat, termasuk fungsi-fungsi audit internal dan eksternal, manajemen risiko fungsi independen dari lini bisnis, dan check and balance lainnya.

Dalam penelitian Zulkafli dan Samad, 2007 (dikutip oleh Praptiningsih, 2009) mengkaji mengenai mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengukur kinerja perusahaan perbankan melalui Mekanisme Pemantauan Kepemilikan (*Ownership*), Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal, Mekanisme Pemantauan Regulator, dan Mekanisme Pemantauan Pengungkapan.

Menurut Iskandar & Chamlaio (2000) dalam Lastanti (2004), mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu *internal* dan *eksternal mechanism*. *Internal mechanism* adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan *external mechanism* adalah cara mempengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, seperti pengendalian perusahaan dan mekanisme pasar.

Dalam penelitian Zulkafli dan Samad, 2007 (dikutip oleh Praptiningsih, 2009) mengkaji mengenai mekanisme tata kelola perusahaan dalam mengukur kinerja perusahaan perbankan melalui Mekanisme Pemantauan Kepemilikan (*Ownership*), Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal, Mekanisme Pemantauan Regulator, dan Mekanisme Pemantauan Pengungkapan.

Dalam penelitian ini lebih banyak mengkaji secara mendalam mekanisme *corporate governance* yang dilakukan oleh Zulkifli dan Samad (2007) dalam penelitiannya. Variabel yang akan dikaji diantaranya Mekanisme Pemantauan Kepemilikan meliputi Kepemilikan Pemegang Saham Pengendali, Kepemilikan Pemerintah, dan Kepemilikan Asing. Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal meliputi Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris dan Komisaris Independen. Mekanisme Pemantauan Regulator tercermin melalui persyaratan cadangan atau Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio*).

Mekanisme Pemantauan Pengungkapan meliputi pengungkapan yang dilakukan oleh Auditor Eksternal *Big 4*.

2.1.3.1 Mekanisme Pemantauan Kepemilikan

a. Struktur Kepemilikan Bank

Kajian mengenai struktur kepemilikan sangat menarik untuk dilihat lebih mendalam lagi mengingat adanya suatu opini yang menyebutkan bahwa kinerja suatu bank akan dipengaruhi oleh siapa yang menjadi pemilik di belakang bank tersebut. Hal ini sangat beralasan karena pemilik memiliki kewenangan yang besar untuk memilih siapa-siapa yang akan duduk dalam manajemen yang selanjutnya akan menentukan arah kebijakan bank tersebut ke depan.

Struktur kepemilikan yang dimaksud dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kelompok:

1. Kepemilikan bank manajerial

Yaitu kepemilikan saham yang dimiliki manajer, direksi, komisaris yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976).

2. Kepemilikan bank institusi

Yaitu kepemilikan saham yang dimiliki institusional dan *blockholders*. Institusional yang dimaksud misalnya LSM, pemerintah maupun swasta. Sedangkan yang dimaksud dengan *blockholders* adalah kepemilikan individu atas lama perorangan diatas 5% tetapi tidak termasuk dalam kepemilikan insider (Fitri dan Mamduh, 2003 dalam Oktapiyani, 2009).

Struktur kepemilikan dalam penelitian ini berupa jumlah pemegang saham pada perusahaan perbankan tersebut dengan perhitungan:

1. Pemilik saham 25 % ke atas dicatat sebagai pemegang saham pengendali
2. Pemilik saham di atas 5% dicatat sebagai satu pemegang saham

3. Pemilik saham di bawah 5% dikelompokkan sebagai satu pemegang saham publik.
4. Pemilik saham di bawah 5%, namun tercatat sebagai satu pemegang saham dicatat sebagai pemegang saham manajerial

b. Pemantauan Kepemilikan

Kajian yang menghubungkan kepemilikan suatu bank dengan kinerja telah dilakukan oleh Barth, Caprio Jr, dan Levine (2002). Tujuan dari kajian yang mereka lakukan adalah untuk:

1. Mengumpulkan dan melaporkan data lintas negara mengenai peraturan dan kepemilikan bank, serta;
2. Mengevaluasi hubungan antara praktek pengaturan/kepemilikan yang berbeda dengan kinerja sektor keuangan dan stabilitas sistem perbankan

Dalam penelitian tersebut, mereka menggunakan data empiris dari 60 negara, dan mengupas permasalahan yang lebih luas dari sekedar hubungan antara struktur kepemilikan dengan kinerja bank. Beberapa penemuan dan kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:

1. Membatasi kepemilikan bank oleh perusahaan non keuangan tidak berkaitan dengan kerapuhan keuangan maupun kinerja bank tersebut;
2. Semakin besar industri perbankan dikontrol/dikendalikan oleh pemerintah, maka inovasi di sektor perbankan akan semakin berkurang;
3. Kepemilikan pemerintah yang semakin besar pada bank cenderung berkaitan dengan semakin banyaknya pelaksanaan sistem keuangan yang buruk serta berkaitan pula dengan semakin banyaknya bank yang perkembangannya lambat/buruk

Bukti empiris memperlihatkan hubungan yang negatif antara tingkat kepemilikan bank oleh pemerintah dan perkembangan keuangan. Negara-negara dengan

kepemilikan bank oleh pemerintah semakin besar cenderung untuk memiliki bank-bank maju (*developed bank*) yang lebih sedikit.

Kajian yang dilakukan oleh Muliaman Hadad, Agus Sugiarto, Wini Purwanti, Joni Hermanto, dan Bambang Arianto (2003), menggunakan data empiris 131 bank yang ada di Indonesia memberikan kesimpulan bahwa kinerja bank tidak memiliki kaitan erat dengan siapa pemiliknya. Dari hasil perhitungan statistik, terlihat bahwa koefisien korelasi yang diperoleh sangat kecil (rata-rata di bawah 30%) dan uji hipotesa dengan tingkat keyakinan 99% menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut, walaupun dalam beberapa kasus ada sedikit keterkaitan.

Mengingat pentingnya hubungan antara pemilik dengan manajemen suatu bank maka perlu dilihat lebih mendalam lagi bagaimana hubungan tersebut apabila pemilik bank tersebut beragam jenis dan latar belakangnya. Dengan kepemilikan bank yang cukup beragam jenisnya baik itu pemerintah, swasta maupun asing, perlu dilihat lebih jauh lagi pengaruhnya terhadap kinerja masing-masing bank (Hadad,dkk 2003). Berikut akan dijelaskan lebih mendalam mekanisme pemantauan tata kelola perusahaan yang dilihat dari sudut pandang kepemilikan saham.

1. Pemantauan Kepemilikan Oleh Besar Pemegang Saham (*Large Block Shareholders*)

Menurut PBI No. 5/25/2003 tentang “Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan,” *slockholders* yang memiliki saham dalam jumlah yang besar dalam bank (*large shareholders*) disebut sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP). Untuk mengatur masalah kepemilikan bank, BI mengeluarkan peraturan bahwa setiap Bank, dipegang oleh satu Pemegang Saham Pengendali. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum dan atau perorangan dan atau kelompok usaha yang:

- a. Memiliki saham Bank sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara;

- b. Memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan Bank dan mempunyai hak suara namun dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian Bank baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk menjadi pemegang saham pengendali harus memenuhi syarat dan ketentuan yang dikeluarkan oleh BI salah satunya harus lolos dalam penilaian kemampuan dan kepatuhan (*fit and proper test*) diantaranya penilaian integritas, kompetensi dan kelayakan keuangan (Peraturan Bank Indonesia No. 5/25 /PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan).

Faktor-faktor yang memotivasi *Large Shareholders Ownership* yaitu *shared benefit of control* dan *privat benefit of control* (Firmansyah, 2006). *Shared benefit of control* timbul dari superior manajemen atau pengawasan yang dapat dihasilkan dari banyaknya hak-hak untuk pembuatan keputusan dan pengaruh kesejahteraan. *Blockholder* juga memiliki dorongan untuk menggunakan *voting power* untuk menikmati sumber penghasilan perusahaan atau untuk menikmati keuntungan-keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan pada pemegang saham minoritas. Hal ini yang disebut *privat benefit of control*. Pemegang saham mayoritas memiliki dorongan yang kuat untuk mengawasi manajemen secara lebih dekat/ mempengaruhi kebijakan bank. *Blockholders* dengan saham mayoritas (PSP) biasanya mendapat jatah kursi dewan direksi. Anggota-anggota mereka diposisikan sebagai direktur atau staf, dimana meletakkan mereka pada posisi tersebut untuk mengawasi perilaku dan kinerja manajer, mempengaruhi keputusan-keputusan manajemen secara langsung. Untuk lembaga keuangan, kursi dewan biasanya terlarang dari kepemilikan secara langsung. PSP juga mempekerjakan atau menunjuk seseorang untuk mewakilinya di dalam dewan komisaris (Belkhir, 2005), hadir dan atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dalam kapasitas sebagai Pemegang Saham Pengendali serta membuat mekanisme pengawasan lain seperti pembentukan komite audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen bekerja berdasarkan kepentingan para *shareholder*.

2. Pemantauan Kepemilikan Pemerintah

Dalam hal kepemilikan pemerintah dalam suatu perbankan, pemerintah serta berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan merupakan agen rakyat (*an agent without principal*) (Firmansyah, 2006). Di negara-negara maju, kepemilikan bank-bank pemerintah dan arah pinjaman mereka di prioritaskan ke sektor-sektor ekonomi, industri dan kebijakan pembangunan. Hal ini menimbulkan berbagai konflik kepentingan jika tujuan pemerintah atau politisi tidak untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan demikian CG dikondisikan oleh sistem pemerintahan yang lebih luas dan hanya dapat diharapkan akan efektif jika struktur pemerintahan yang lebih luas mendukung. Peran kepemilikan pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal pengendalian. Pengendalian pemerintah dapat digunakan untuk memecahkan masalah konflik antara dewan manajemen dan para pemegang saham (Bai, Liu, Lu, Song, dan Zhang, 2003 dalam Praptiningsih, 2009)

Dalam industri perbankan, pemilik merupakan subjek dari regulasi dan supervisi pemerintah. Melalui regulasi tersebut, pemerintah berusaha membatasi intervensi pemilik dalam pengelolaan bank karena adanya potensi manajemen untuk memaksimumkan kepentingan mereka yang menimbulkan potensi kerugian pihak lain. Disiplin manajer dalam mematuhi regulasi tergantung pada karakter, kepentingan, dan kekuatan pemilik dalam mengendalikan manajemen bank (Firmansyah, 2006).

Pada umumnya, bank yang ada di Indonesia kepemilikan pemerintah terdapat pada bank yang sahamnya sebagian besar/seluruhnya dimiliki pemerintah yakni dalam katagori Bank milik negara (BUMN) dan Bank milik pemerintah daerah (BPD).

3. Pemantauan Kepemilikan Asing

Isu kepemilikan bank lokal oleh bank asing sudah mengemuka dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Dalam Business News (25 Februari 2010), polemik ini dipicu oleh masuknya investor asing baik berwujud bank asing maupun lembaga investasi asing yang secara masif membeli saham-saham bank lokal yang dinilai berharga murah baik melalui pola pembelian di pasar modal maupun dengan menggunakan *pole strategic partner*. Mekanisme pemantauan kepemilikan saham bank oleh pemegang saham asing (bank asing) melalui merger atau dengan cara pengendalian terhadap pengambilan keputusan melalui *votting power* dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mempekerjakan atau menunjuk seseorang untuk mewakilinya di dalam dewan komisaris, serta membuat mekanisme pengawasan lain seperti pembentukan komite audit yang bertujuan untuk memastikan bahwa manajemen bekerja berdasarkan kepentingan para *shareholders*.

2.1.3.2 Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal

Internal corporate governance mempunyai efek langsung guna mendorong manajer untuk meningkatkan kinerja (Faisal, 2005). *Internal corporate governance* dibedakan menurut fokus pengendaliannya yakni *internal corporate governance*-manajer (ICG-manajer) dan *internal corporate governance*-pemilik (ICG-pemilik), ICG-manajer menekankan pada pengendalian dalam diri manajer yang distimuli secara internal (melalui perhatian pemilik terhadap kepentingan manajer) agar manajer meningkatkan kinerja terutama dalam hal pendapatan bank (*revenue*). Sedangkan ICG-pemilik menekankan pada pengendalian manajer (melalui pihak lain) agar manajer meningkatkan efisiensi. Dengan demikian, kombinasi dari dua bentuk ICG ini cenderung *superior* dalam menjelaskan kemampuan *good corporate governance* dalam mempengaruhi kinerja bank.

Dalam penelitian ini, pemantauan terhadap terselenggaranya system pengendalian intern dalam rangka mewujudkan *good corporate governance* dipengaruhi oleh empat faktor:

1. Ukuran Dewan Direksi.

Sesuai dengan PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 3/21/PBI/2001 TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM BANK UMUM dalam rangka pemantauan terhadap pengendalian internal bank, direksi mempunyai tanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur pengendalian intern; melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris; memelihara suatu struktur organisasi; memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern.

Untuk memantau serta memastikan sistem pengendalian internal berjalan efektif, direksi melakukan langkah-langkah, antara lain :

1. Menugaskan para manajer/pejabat dan staf yang bertanggungjawab dalam kegiatan atau fungsi tertentu untuk menyusun kebijakan dan prosedur pengendalian intern terhadap kegiatan operasional serta kecukupan organisasi;
2. Melakukan pengendalian yang efektif untuk memastikan bahwa para manajer/pejabat dan pegawai telah mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan;
3. Mendokumentasikan dan mensosialisasikan struktur organisasi yang secara jelas menggambarkan jalur kewenangan dan tanggung jawab pelaporan serta menyelenggarakan suatu sistem komunikasi yang efektif kepada seluruh jenjang organisasi Bank;
4. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa kegiatan fungsi pengendalian intern telah dilaksanakan oleh manajer/pejabat dan pegawai yang memiliki pengalaman dan kemampuan yang memadai;
5. Melaksanakan secara efektif langkah perbaikan atau rekomendasi dari auditor intern dan atau auditor ekstern, antara lain dengan cara menugaskan pegawai yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya.

Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja bank karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya (Pfefer, 1973; Pearce & Zahra, 1992 dalam Faisal, 2005)

2. Ukuran Dewan Komisaris

Menurut PBI NOMOR 8/14/PBI/2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 8/4/PBI/2006 TENTANG PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE BAGI BANK UMUM “Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2..” (pasal 9 : 1).

Secara hukum dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada direksi. Dalam melakukan pemantauan terhadap direksi, dewan komisaris memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank (SKAI), auditor eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lain. Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya harus mampu mengawasi dipenuhinya kepentingan semua *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan, serta mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.

Ukuran dewan komisaris menentukan tingkat keefektifan pemantauan kinerja bank. Menurut Chtourou *et al* (2001) dalam penelitiannya bahwa dengan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Dalam komposisi ukuran dewan komisaris didalamnya terdapat komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

3. Komisaris Independen

Di Indonesia saat ini, keberadaan komisaris independen sudah diatur dalam *Code of Good Corporate Governance* (KNKCG). Komisaris menurut *Code* tersebut, bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan untuk mengawasi kebijakan dan kegiatan yang dilakukan direksi dan memberikan nasihat bilamana diperlukan. Tugas utama komisaris independen adalah memperjuangkan kepentingan pemegang saham minoritas.

Kriteria yang harus dimiliki oleh komisaris independen menurut Surat Edaran BI No.9/12/DPNP adalah sebagai berikut:

1. **Tidak memiliki hubungan keuangan**, yakni apabila memperoleh penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau direksi (pengurus) Bank, dari perusahaan yang PSP nya pengurus Bank, dan dari Pemegang Saham Pengendali (PSP) Bank
2. **Tidak memiliki hubungan kepengurusan**, yakni apabila menjadi pengurus pada perusahaan dimana Dewan Komisaris Bank lainnya menjadi pengurus, menjadi pengurus pada perusahaan yang PSP nya pengurus Bank, dan menjadi pengurus atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan PSP Bank
3. **Tidak memiliki hubungan kepemilikan saham**, yakni apabila menjadi pemegang saham pada perusahaan yang PSP nya adalah pengurus dan/atau PSP Bank, dan/atau menjadi pemegang saham pada perusahaan PSP Bank
4. **Tidak memiliki hubungan dengan Bank apabila:**
 - a. Memiliki saham Bank lebih dari 5% dari modal disetor bank
 - b. Menerima/memberi penghasilan, bantuan keuangan atau pinjaman dari/kepada Bank yang menyebabkan pihak yang member bantuan, seperti pihak terafiliasi dan/atau pihak yang melakukan transaksi keuangan dengan bank (debitur inti dan deposan inti).

Aktivitas monitoring oleh pihak independen sangat diperlukan. Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa semakin banyak jumlah pemonitor maka kemungkinan terjadi konflik semakin rendah dan akhirnya akan menurunkan *agency cost*. Hal ini dapat menumbuhkan tingka kepercayaan investor, pihak ketiga terhadap perusahaan (Bathala, et al. 1994 dalam Oktapiyani, 2009). Pihak independen ini dapat berperan sebagai agen pengawas yang efektif untuk mengurangi masalah keagenan, karena mereka dapat mengendalikan perilaku oportunistik manajer .

2.1.3.3 Mekanisme Pemantauan Regulator

Pemerintah baik dalam konteks eksekutif dan legislatif merupakan pihak yang berperan sebagai regulasi dan supervisi yang menjaga solvabilitas (*solvency*) bank dan merupakan insentif bagi *stakeholders* dalam upaya melakukan pengendalian atau -secara lebih luas- menerapkan *corporate governance* pada industri perbankan. Pemerintah perlu menyusun kerangka acuan yang jelas dalam bentuk peraturan perundang-undangan agar kompetisi berjalan dengan baik. Kerangka pengaturan yang baik akan menciptakan persaingan antar dunia usaha sehingga hanya perusahaan efisien yang dapat bertahan hidup (*survival of the fittest*). Kondisi ini pada gilirannya akan menguntungkan konsumen/ nasabah/ debitor. Peran pemerintah juga dapat menciptakan iklim investasi diperlukan untuk mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) atau kegagalan *laissez-faire* mencapai efisiensi. Pemerintah mengatur dunia usaha dan transaksi untuk meminimalkan *information asymetries* dan mencegah monopoli (Firmansyah, 2006).

Bank Indonesia yang mewakili regulator pemerintah melakukan intervensi melalui hukum dan peraturan untuk mengawasi serta memantau jalannya kinerja perbankan guna melindungi kepentingan para deposan maupun *debt holders*. Peraturan tersebut tercermin dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas PBI No. 8/4/PBI/2006 serta Surat Edaran Bank Indonesia No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum.

2.1.4 Pengertian, Pengelompokan, dan Kegiatan Bank

2.1.4.1 Pengertian Bank

Menurut UU No 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.4.2 Pengelompokan Bank

Menurut UU No 10 Tahun 1998, bank dikelompokan atas:

1. Bank Umum

Bank umum atau yang biasa dikenal dengan nama bank komersial adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti memberikan seluruh jasa perbankan yang ada.

2. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya disini bahwa kegiatan BPR jauh lebih sempit dibandingkan dengan kegiatan bank umum. Selain pengelompokan diatas, jenis-jenis bank juga dapat dibedakan:

1. Berdasarkan kepemilikannya, bank dapat dibedakan menjadi:

- a. Bank milik negara (BUMN)
- b. Bank milik pemerintah daerah (BPD)
- c. Bank milik swasta nasional

- d. Bank milik swasta asing
 - e. Bank milik swasta campuran (swasta nasional dan swasta asing)
2. Berdasarkan penekanan kegiatannya, bank dapat dibedakan menjadi:
 - a. Retail banks (bank retail)
 - b. Corporate banks (bank korporasi)
 - c. Commercial banks (bank komersial)
 3. Berdasarkan fungsinya, bank dapat dibedakan menjadi:
 - a. Bank sentral
 - b. Bank umum
 - c. Bank tabungan
 - d. Bank pembangunan

2.1.4.3 Kegiatan Bank

Dalam menjalankan perannya sebagai sebuah lembaga intermediasi, kegiatan bank sehari-hari juga tidak lepas dari kegiatan menerima uang dan mengeluarkan uang dalam bentuk kredit. Kegiatan perbankan yang ada di Indonesia, terutama bank umum adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (funding)
 - a. Simpanan tabungan (saving deposit)
 - b. Simpanan giro (demand deposit)
 - c. Simpanan deposito (time deposit)
2. Menyalurkan dana ke masyarakat
 - a. Kredit investasi
 - b. Kredit modal kerja

- c. Kredit perdagangan
 - d. Kredit konsumtif
 - e. Kredit produktif kerja
3. Memberikan jasa perbankan lainnya:
- a. Kliring
 - b. Pengiriman uang (transfer)
 - c. Inkaso
 - d. Letter of credit (L/C)
 - e. Perdagangan surat berharga
 - f. Perdagangan valuta asing
 - g. Perbankan elektronik (ATM)

2.1.4.4 Sumber Dana Bank

Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan persoalan bank yang paling utama. Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank ataupun aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Dana-dana bank yang digunakan sebagai modal operasional bersumber dari:

- a. Dana dari modal sendiri, sering disebut juga dana dari pihak ke I, yaitu dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham.
- b. Dana pinjaman dari pihak luar, sering disebut dengan dana pihak ke II, yaitu dana yang diperoleh dari pihak yang memberikan pinjaman dana pada bank.
- c. Dana dari masyarakat, sering disebut dengan dana dari pihak ke III, yaitu dana yang diperoleh dari peran bank sebagai wadah perantara keuangan masyarakat. Dana-dana masyarakat yang disimpan dalam

bank merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank seperti giro, deposito dan tabungan.

2.1.5 Kinerja Perbankan

Kinerja adalah pencapaian dari suatu tujuan suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Kinerja merupakan pengawasan terus menerus dan pelaporan penyelesaian program, terutama kemajuan terhadap tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja perbankan tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja perusahaan dilakukan untuk melakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Dengan kata lain mengukur kinerja perusahaan itu merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif.

Penilaian kinerja bank sangat penting untuk setiap *stakeholders* bank yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat selalu menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan deviden dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang dan dapat memenuhi ketentuan *prudential banking regulation* dengan baik, maka ada kemungkinan nilai sahamnya dan jumlah dana pihak ketiga akan naik. Kenaikan nilai saham dan jumlah dana pihak ketiga ini merupakan salah satu indikator naiknya kepercayaan masyarakat kepada bank yang bersangkutan.

Kinerja perbankan sendiri sering dinilai terkait erat dengan tingkat kesehatan bank. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Dalam UU RI No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 29 disebutkan bahwa Bank Indonesia berhak untuk menetapkan

ketentuan tentang kesehatan bank dengan memperhatikan aspek permodalan, kualitas asset, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank. Oleh karena itu Bank Indonesia mengeluarkan surat keputusan direksi Bank Indonesia No 30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 yang mengatur tata cara penilaian tingkat kesehatan bank.

Metode penilaian tingkat kesehatan bank tersebut di atas kemudian dikenal sebagai metode CAMEL. Metode ini berisikan langkah-langkah yang dimulai dengan menghitung besarnya masing-masing rasio pada komponen-komponen berikut ini:

- 1) C : Capital (untuk rasio kecukupan modal)
- 2) A : Asset (untuk rasio kualitas aktiva)
- 3) M : Management (untuk menilai kualitas manajemen)
- 4) E : Earnings (untuk rasio-rasio rentabilitas bank)
- 5) L : Liquidity (untuk rasio-rasio likuiditas bank)

Pengukuran kinerja secara garis besar dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran non finansial dan finansial. Kinerja non finansial adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan informasi-informasi non finansial yang lebih dititik beratkan dari segi kualitas pelayanan kepada pelanggan. Sedangkan pengukuran kinerja secara finansial adalah penggunaan informasi-informasi keuangan dalam mengukur suatu kinerja perusahaan. Informasi keuangan yang lazim digunakan adalah laporan rugi laba dan neraca. Dari laporan laba rugi, variabel kinerja finansial yang digunakan adalah *Earning Before Interest and Tax (EBIT)* dan *Earning Available for Common Stock (EACS)*. EBIT menggambarkan profit yang tersisa setelah dikurangi dengan pengeluaran operasional dari gross margin. EBIT ini menggambarkan keuntungan perusahaan dari aktivitas bisnis sebelum dikurangi pajak (Bertoneche dan Knight, 2001 dalam Wibisono, 2004). Sedangkan EACS menggambarkan keuntungan perusahaan setelah dikurangi pajak dan pungutan finansial lain (Wibisono, 2004).

Kinerja perusahaan juga bisa diukur dengan rasio-rasio keuangan lain, seperti *Market Share Growth*, *Return On Investment (ROI)*, *Return On Asset (ROA)*, *ROI growth*, *Return On Sales (ROS)*, *ROS growth assets (Itter dan Larker, 1997)*, *price earning ratio*, *Tobin's Q*, dan rasio-rasio keuangan lainnya.

Dalam penelitian ini menggunakan alat ukur rasio ROA sebagai dasar pengukuran kinerja finansial keuangan. ROA digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan operasi dengan total aktiva yang ada. Copeland dan Weston, 1994 (dalam Firmansyah, 2006) menyatakan bahwa ROA mencoba mengukur efektifitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh sumber dayanya. Tinggi rendahnya ROA mengindikasikan seberapa besar efisiensi penggunaan modal dan turun naik pendapatan.

2.1.6 Penelitian Terdahulu

Lastanti (2004) meneliti hubungan struktur *corporate governance* dengan kinerja perusahaan dan reaksi pasar. Struktur *corporate governance* diukur dengan komposisi Dewan Komisaris independen, struktur kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan institusional. Sedangkan reaksi pasar diproksi dengan nilai perusahaan (diukur dengan *Tobin's Q*) dan kinerja perusahaan (diukur dengan ROA dan ROE). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan positif yang signifikan antara independensi Dewan Komisaris dengan *Tobin's Q*. Sementara variabel yang lain tidak berpengaruh secara signifikan, baik terhadap nilai perusahaan maupun kinerja perusahaan.

Klapper dan Love (2002) dalam Darmawati, dkk. (2005) menemukan adanya hubungan positif antara *corporate governance* dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan return on assets (ROA) dan *Tobin's Q*. Penemuan penting lainnya adalah bahwa penerapan *corporate governance* di tingkat perusahaan lebih memiliki arti dalam negara berkembang dibandingkan dalam negara maju. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan *corporate governance* yang baik akan memperoleh manfaat yang lebih besar di Negara-negara yang lingkungan hukumnya buruk.

Penelitian yang dilakukan oleh Rosyana (1997) dalam Firmansyah (2006) terhadap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada periode 1990-1993 dengan indikator EVA, MVA dan ROA untuk mengukur kinerja saham menunjukkan bahwa EVA belum banyak digunakan oleh para investor baik domestik ataupun asing. Hasil korelasi antara EVA dengan MVA pada perusahaan-perusahaan yang listed di BEJ tidak menunjukkan korelasi yang signifikan. Penelitian Rosyana menyebutkan bahwa di Indonesia indikator ROA merupakan pengukuran umum terhadap kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan belum efisiennya pasar modal Indonesia, para investor belum sepenuhnya menggunakan informasi yang tersedia untuk menganalisis saham, sehingga harga saham yang terjadi belum mencerminkan informasi yang ada.

Imam Ghozali dan Irwansyah (2002) dalam Oktapiyani (2009) menguji pengaruh EVA, MVA, dan ROA terhadap *return* saham pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dengan jumlah sampel 20 perusahaan periode 1996-2000. Dalam penelitian tersebut menggunakan uji regresi berganda yang memberikan hasil bahwa EVA dan ROA tidak berpengaruh pada *return* saham dengan nilai statistik t masing-masing 0,767 dan 1,595 dan p masing-masing 0,445 dan 0,114. Sedangkan MVA berpengaruh positif terhadap *return* saham dengan nilai $t=2,205$ dan $p=0,030$.

Suranta dan Machfoedz (2003) melakukan penelitian tentang struktur kepemilikan, nilai perusahaan, investasi dan ukuran dewan direksi. Dengan menggunakan persamaan OLS, hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan adalah linier dan negatif. Dengan menggunakan persamaan simultan 2SLS dan 3SLS dan memasukkan variable kepemilikan institusional dan ukuran dewan direksi, hasil regresi menunjukkan bahwa nilai perusahaan hanya dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, institusional dan ukuran dewan direksi.

Hastuti (2005) meneliti hubungan antara GCG dan struktur kepemilikan dengan kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan (1) tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan, (2) tidak terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen laba dengan

kinerja keuangan, (3) terdapat hubungan yang signifikan antara *disclosure* dengan kinerja perusahaan.

Siallagan dan Machfoedz (2006) meneliti hubungan mekanisme *corporate governance*, kualitas laba dan nilai perusahaan. Dalam penelitian ini, mekanisme corporate governance diproksi oleh kepemilikan manajerial, keberadaan komite audit dan proporsi dewan komisaris independen. Dengan menggunakan 74 sampel dan 197 observasi, hasil menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* mempengaruhi nilai perusahaan (Tobin's Q).

Mohammed Belkhir (2005) dari UAE University memeriksa hubungan antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perbankan dengan menggunakan sampel sebanyak 174 bank dan lembaga simpan pinjam/keuangan lain selama periode 1995-2002. Dimana kinerja bank diproksikan dengan Tobin's q dan ROA. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa *Bank Size* yang diproksikan dengan logaritma natural dari total asset, *CEO ownership*, serta *CEO-chairman duality*. Dari penelitian yang menggunakan metode regresi ini, didapatkan suatu hasil yang mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

Irmala Sari (2010) dari Universitas Diponegoro Semarang yang menjadi sumber inspirasi skripsi ini, telah menguji hubungan pengaruh variable kepemilikan pemegang saham pengendali (OWN), kepemilikan asing (FOR), kepemilikan pemerintah (GOV), ukuran dewan direksi (BOD), ukuran dewan komisaris (BOC), komisaris independen (INDB), auditor eksternal (BIG 4), CAR dan SIZE terhadap kinerja perusahaan perbankan yang diproksikan melalui ROA, dengan mengambil sumber data dari Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Klapper dan Love (2002)	<i>Corporate Governance, Return on Assets (ROA) dan Tobin's Q</i>	Adanya hubungan positif antara <i>corporate governance</i> dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan <i>return on assets (ROA) dan Tobin's Q</i>
2	Hexana Sri Lastanti (2004)	Ukuran Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Terkonsentrasi, Kepemilikan Institusional, Tobin's Q, ROA, ROE	Adanya hubungan positif yang signifikan antara independensi Dewan Komisaris dengan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Sementara variabel yang lain tidak berpengaruh secara signifikan, baik terhadap nilai perusahaan maupun kinerja perusahaan. (yang diukur oleh ROA dan ROE)
3	Rousana (1997)	EVA, MVA, ROA	Hasil korelasi antara EVA dengan MVA pada perusahaan-perusahaan yang listed di BEJ tidak menunjukkan korelasi yang signifikan pada kinerja saham. Hal ini disebabkan karena di Indonesia indikator ROA merupakan pengukuran umum terhadap kinerja perusahaan
4	Imam Ghozali dan Irwansyah (2002)	EVA, MVA, ROA	Tidak adanya pengaruh EVA dan ROA pada <i>return</i> saham. Sedangkan

			MVA berpengaruh positif terhadap <i>return</i> saham
5	Suranta dan Machfoedz (2003)	Struktur kepemilikan, nilai perusahaan (Tobin's Q), investasi, ukuran dewan direksi	Hubungan kepemilikan manajerial dan nilai perusahaan adalah linear dan negative, nilai perusahaan hanya dipengaruhi oleh kepemilikan manajerial, institusional dan ukuran dewan direksi
6	Hastuti (2005)	GCG, Struktur kepemilikan, dan kinerja keuangan	Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara manajemen laba dengan kinerja dan terdapat hubungan yang signifikan antara <i>disclosure</i> dengan kinerja perusahaan
7	Siallagan dan Machfoedz (2006)	Kepemilikan manajerial, komite audit, komisaris independen, leverage, firm size, kualitas laba dan nilai perusahaan	mekanisme <i>corporate governance</i> mempengaruhi nilai perusahaan (Tobin's Q)
8	Mohammed Belkhir (2005)	ukuran dewan komisaris dengan kinerja perbankan (Tobin's Q dan ROA) dengan menggunakan variabel kontrol berupa <i>Bank Size</i>	terdapat hubungan positif antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
9	Irmala Sari (2010)	CAR dan SIZE terhadap ROA	Terdapat hubungan antara kesemua elemen variabel, meski kurang signifikan.

1.1 KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.2.1 Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Kinerja Perbankan

Menurut Caprio, et al. (2003) mekanisme tata kelola perusahaan akan mampu mengurangi perampasan sumber daya bank dan mempromosikan efisiensi bank. Ini adalah salah satu fakta mengenai pentingnya tata kelola perusahaan perbankan.

Menurut Niu (2006) dalam Praptiningsih (2009), mekanisme *corporate governance* yang lebih kuat akan mengurangi perilaku oportunistik manajemen sehingga meningkatkan kualitas dan keandalan pelaporan keuangan. Dalam penelitian lain, (Eldomiaty & Choi, 2003) menegaskan bahwa lembaga perbankan sebenarnya telah memiliki kontribusi positif untuk kinerja perusahaan yang menunjukkan tata kelola perusahaan yang baik dapat memecahkan masalah *agency* khususnya perusahaan perbankan.

2.2.2 Pengaruh Mekanisme Pemantauan Kepemilikan Terhadap Kinerja Perbankan

a. Pemantauan Kepemilikan Pemegang Saham Pengendali.

Konsentrasi kepemilikan pada segelintir pemegang saham (pemegang saham pengendali) membuat pelaksanaan *monitoring* terhadap pihak manajemen menjadi lebih mudah. Dengan terkonsentrasinya kepemilikan, pemegang saham mempunyai kemampuan untuk memainkan peranan dalam pengawasan manajemen, karena mereka mendapatkan kekuasaan melalui *voting right*. Adanya monitoring yang cukup tinggi membuat manajer mempunyai derajat *disretion* yang rendah dalam mengambil keputusan-keputusan untuk menguntungkan dirinya. Hal ini akan mengurangi konflik keagenan dan dapat menyelaraskan kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Belkhir, 2005).

Cai et al. (2001) dalam Faisal (2005) menemukan hubungan yang berlawanan antara kinerja saham dengan kepemilikan saham institusional. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5 persen)

mengindikasikan kemampuannya dalam memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Shleifer dan Vishny (1986) dalam Lastanti (2004) menunjukkan bahwa *larger shareholders* (pemegang saham pengendali) dapat lebih banyak melakukan monitoring terhadap pihak manajemen perusahaan dan meningkatkan nilai perusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara konsentrasi kepemilikan dengan nilai perusahaan, *large shareholders* dapat mengurangi *freerider* yang merupakan masalah bagi investor kecil sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Demsetz dan Lehn (1985) dalam Gunarsih (2003) juga menjelaskan bahwa konsentrasi kepemilikan menghilangkan konflik kepentingan antara pemilik dan manajer karena insentif yang dimiliki pemilik untuk memonitor manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Mitton (2002) dalam Praptiningsih (2009) menemukan bahwa besar pemegang saham minoritas dapat memperoleh manfaat pemegang saham karena kekuasaan dan insentif untuk mencegah pengambilalihan. Penelitian pada konsentrasi kepemilikan oleh institusi dilakukan oleh Pound (1988), McConnell dan Servaes (1990), dan Brickley, dkk. (1988). Ketiga penelitian mendukung pernyataan bahwa meningkatnya konsentrasi kepemilikan (Pemegang Saham Pengendali) akan meningkatkan nilai perusahaan (Gunarsih, 2003)

a. Pemantauan Kepemilikan Asing

Struktur kepemilikan perusahaan berbeda di batasan negara. La Porta, dkk. (1999) dalam Gunarsih (2003) menemukan bahwa kepemilikan menyebar hanya terjadi pada negara dengan perlindungan legal yang sangat baik terhadap pemilik.

Pada bentuk kepemilikan menyebar, masalah perbedaan kepentingan utama yang terjadi adalah antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan manajemen perusahaan. Dengan tersebarnya mayoritas

kepemilikan saham kepada kepemilikan asing (*foreign ownership*) maka pelaksanaan monitorin para pemegang saham kepada pihak manajemen perusahaan menjadi lemah karena pemegang saham tidak mempunyai insentif dan kemampuan untuk memonitor manajemen. Kurangnya monitoring pemegang saham juga berkaitan dengan adanya masalah *freerider* (Zhuang, dkk., 2000 dalam Gunarsih, 2003).

b. Pemantauan Kepemilikan Pemerintah

Penelitian mengenai peran kepemilikan pemerintah dalam kinerja bank dilakukan oleh Barth, Caprio Jr dan Levine (2002) dengan menggunakan data dari 60 negara. Studi tersebut menggunakan pengukuran alternatif kepemilikan bank, serta menguji hubungan antara kepemilikan pemerintah dan perkembangan keuangan. Hasil studi mereka memperlihatkan bahwa kepemilikan pemerintah memperlambat perkembangan yang terjadi di sektor keuangan. Dapat disimpulkan pula bahwa kepemilikan bank oleh lembaga non keuangan tidak memiliki hubungan dengan kinerja bank tersebut. Selanjutnya kepemilikan bank yang semakin besar oleh pemerintah cenderung mengalami perkembangan kinerja yang melambat. Meskipun demikian peran kepemilikan pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal pengendalian. Pengendalian pemerintah dapat digunakan untuk memecahkan masalah konflik antara dewan manajemen dan para pemegang saham (Bai, Liu, Lu, Song, dan Zhang, 2003).

2.2.3 Pengaruh Mekanisme Pemantauan Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Perbankan

a. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi Terhadap Kinerja Perbankan

Dewan direksi bertugas menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi jangka panjang maupun jangka pendek. Penelitian mengenai pengaruh ukuran dan komposisi dewan direksi dalam perusahaan telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pfefer (1973) dan Pearce & Zahra (1992) dalam Faisal (2005) bahwa peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya.

Hal ini didukung oleh pendapat Alexander, Fernell, Halporn (1993) dan Goodstein, Gautarn, Boeker (1994) dalam Wardhani (2006) yang menyatakan jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resource dependence* yaitu bahwa perusahaan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik.

b. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Perbankan.

Dewan komisaris adalah salah satu mekanisme yang digunakan untuk memonitor manajer. Ukuran dewan komisaris dapat mempengaruhi efektif tidaknya aktivitas pengawasan. Prefer (dalam Faisal, 2005) mengungkapkan bahwa peningkatan ukuran dewan komisaris akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya.

Menurut Chtourou *et al* (2001) dalam penelitiannya bahwa dengan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence*. Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik.

Dewan komisaris yang ukurannya besar kurang efektif daripada dewan komisaris yang ukurannya kecil. Jensen & Eisenberg *et.al* (dalam Faisal, 2005) menyatakan jumlah dewan komisaris yang kecil akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dari hasil pengujian teori diatas, maka ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

c. Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Perbankan

Proporsi dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan atau komisaris independen juga mempengaruhi kinerja perusahaan yang bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijakan manajemen serta memberikan nasihat kepada manajemen. Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi

monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* (Fama dan Jensen, 1983).

Barnhart & Rosenstein (1998) dalam Lastanti (2004) melakukan penelitian mengenai “*Board Composition, Managerial Ownership and Firm Performance*”, yang membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari *outsider director* (komisaris independen), maka semakin tinggi independensi dan efektivitas *corporate board* sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Hubungan antara komisaris independen dan kinerja perbankan juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan (Jones, 1979 dalam Lastanti, 2004). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yermack, 1996; Daily & Dalton, 1993; Stearn & Mizruchi, 1993 juga menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (dalam Wardhani, 2006).\

2.1.7 Pengaruh Mekanisme Pemantauan Regulator Terhadap Kinerja Perbankan

Menurut (Brigham dan Erhardt, 2005), yang meninjau dari Komite Basel menyiratkan bahwa pemantauan peraturan (regulator) yang dikeluarkan oleh bank sentral atau pemerintah juga mempengaruhi kinerja perbankan terutama dalam profitabilitas, melalui persyaratan cadangan dan atau Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/ CAR*).

2.1.8 Variabel Kontrol

Dalam penelitian ini, ukuran bank diproksi oleh total *assets*, yang diukur dengan menggunakan logaritma natural dari total *asset*. Variabel ukuran bank dijadikan sebagai variabel kontrol untuk mengeliminir pengaruh dari faktor-faktor di luar variabel yang diuji. Variabel kontrol juga dimaksudkan untuk melihat apakah dengan dimasukkannya variabel ini dalam suatu model, maka variable

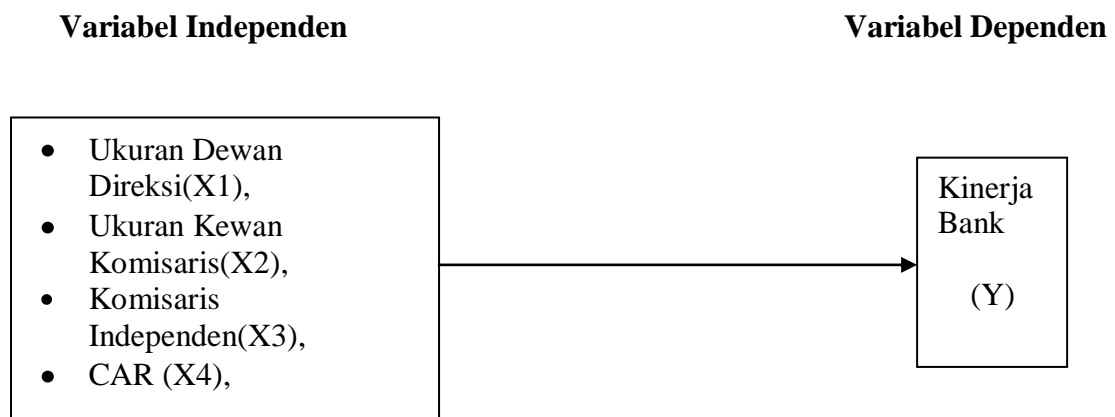
independen secara signifikan menjadi semakin tinggi sehingga dapat memperkecil *error term*.

Suatu perusahaan besar dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses pasar modal, hal ini berarti bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas dan kemampuan untuk mendapatkan dana. Dengan dana yang lebih banyak, perusahaan dapat menciptakan peluang pertumbuhan sehingga kinerja perusahaan menjadi lebih baik. Dengan demikian, perusahaan yang berukuran besar cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Penelitian Suranta dan Midiastuty (2004) menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin besar nilai perusahaan.

Dalam penelitian ini menggunakan variabel yang terdiri dari satu variabel dependen (kinerja perusahaan perbankan dengan ROA sebagai proxi-nya), empat variabel independen (ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan satu variabel kontrol (ukuran bank).

Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran Penelitian



2.2 HIPOTESIS PENELITIAN

Berdasarkan teori dan kerangka konseptual, penelitian ini akan membangun hipotesis dalam menguji hubungan bagaimana masing-masing variabel independen berhubungan dengan variabel dependen :

1. Dewan direksi bertugas menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi jangka panjang maupun jangka pendek. Penelitian mengenai pengaruh ukuran dan komposisi dewan direksi dalam perusahaan telah banyak dilakukan. Beberapa diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pfeffer (1973) dan Pearce & Zahra (1992) dalam Faisal (2005) bahwa peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya. Hal ini didukung oleh pendapat Alexander, Fernell, Halporn (1993) dan Goodstein, Gautarn, Boeker (1994) dalam Wardhani (2006) yang menyatakan jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resource dependence* yaitu bahwa perusahaan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik.

H1: Ukuran Dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.

2. Menurut Chtourou *et al* (2001) dalam penelitiannya bahwa dengan jumlah dewan yang semakin besar maka mekanisme monitoring manajemen perusahaan akan semakin baik. Jumlah dewan yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resources dependence*. Maksud dari pandangan *resources dependence* adalah bahwa perusahaan akan tergantung dengan dewannya untuk dapat mengelola sumber dayanya secara lebih baik.

H2: Ukuran Dewan komisaris (*Board Size*) berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.

3. Barnhart & Rosenstein (1998) dalam Lastanti (2004) melakukan penelitian mengenai "*Board Composition, Managerial Ownership and Firm Performance*", yang membuktikan bahwa semakin tinggi perwakilan dari *outsider director* (komisaris independen), maka semakin tinggi independensi dan efektivitas *corporate board* sehingga dapat meningkatkan nilai

perusahaan. Hubungan antara komisaris independen dan kinerja perbankan juga didukung oleh perspektif bahwa dengan adanya komisaris independen diharapkan dapat memberikan fungsi pengawasan terhadap perusahaan secara objektif dan independen, menjamin pengelolaan yang bersih dan sehatnya operasi perusahaan sehingga dapat mendukung kinerja perusahaan (Jones, 1979 dalam Lastanti, 2004). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Yermack, 1996; Daily & Dalton, 1993; Stearn & Mizruchi, 1993 juga menyatakan bahwa tingginya proporsi dewan luar berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (dalam Wardhani, 2006).\

H3: Komisaris Independen (*Board Independence*) berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.

4. Menurut (Brigham dan Erhardt, 2005), yang meninjau dari Komite Basel menyiratkan bahwa pemantauan peraturan (regulator) yang dikeluarkan oleh bank sentral atau pemerintah juga mempengaruhi kinerja perbankan terutama dalam profitabilitas, melalui persyaratan cadangan dan atau Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy Ratio/ CAR*).

H4: CAR berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 VARIABEL PENELITIAN DAN DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian ini melibatkan variabel yang terdiri dari delapan variabel bebas (independen), satu variabel terikat (dependen) dan satu variabel kontrol. Variabel independen dalam penelitian ini meliputi ukuran dewan direksi, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, dan CAR. Variabel dependennya adalah kinerja perusahaan perbankan yang diukur oleh ROA. Sedangkan ukuran bank yang diproksikan dengan *natural logaritma asset* merupakan variabel kontrol penelitian.

3.1.1 Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini meliputi:

1. Ukuran Dewan Direksi

Ukuran dewan direksi diukur dengan jumlah anggota dewan direksi yang ada dalam perusahaan (Faisal, 2005). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor

8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

1. Ukuran Dewan Komisaris

Yaitu jumlah anggota dewan komisaris yang bertanggung jawab mengawasi perusahaan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan (Beiner *et al*, 2003). Menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, jumlah anggota dewan Komisaris pada perusahaan perbankan paling kurang 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen.

2. Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan rasio prosentase antara jumlah komisaris yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) terhadap total jumlah anggota dewan komisaris perusahaan.

3. *Capital Adequacy Ratio* (CAR)

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 pasal 2 ayat 1 tercantum bank wajib menyediakan modal minimum sebesar 8% dari aset tertimbang menurut resiko (ATMR), CAR adalah rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank (PBI, 2008).

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

3.1.2 Variabel Dependen

Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya, penelitian ini mencoba untuk menyelidiki hubungan langsung antara mekanisme pemantauan tata kelola perusahaan, dengan semua proksinya, yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dimana ROA sebagai proksi.

Return on Asset (ROA) adalah rasio pendapatan sebelum bunga dan pajak (EBIT) atau net pendapatan dibagi dengan nilai buku aset di awal tahun fiskal (Brigham & Ehrhardt, 2005). *Return on Asset* mengukur pendapatan perusahaan dalam hubungannya dengan semua sumber daya itu pada bagian disposal (modal pemegang saham ditambah dana jangka pendek dan panjang yang dipinjam). Jika perusahaan tidak memiliki utang, maka laba atas aset dan laba atas ekuitas akan sama. Suatu indikator bagaimana keuntungan perusahaan relatif terhadap total aset. ROA memberikan ide mengenai bagaimana manajemen yang efisien menggunakan aset-asetnya untuk menghasilkan penghasilan. Dihitung dengan membagi penghasilan tahunan perusahaan dari total aset, ROA ditampilkan sebagai persentase. Kadang-kadang ini disebut sebagai "laba atas investasi". (Brigham & Erhardt, 2005). Berikut ini adalah perhitungan rasio ROA:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{TOTAL ASSET}} \times 100\%$$

3.2 POPULASI DAN SAMPEL

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bank Indonesia selama periode 2009-2011. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun kriteria yang digunakan untuk memilih sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan perbankan *go public* yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2009-2011.
2. Masih beroperasi hingga tahun 2011.
3. Bank mempublikasikan laporan tahunan (*annual report*) untuk periode 31 Desember 2009-2011 di dalam website Bank Indonesia.
4. Perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance*, struktur kepemilikan, rasio keuangan, dan auditor eksternal dalam laporan tahunannya.
5. Pemilihan rentang waktu bertujuan agar penelitian hanya berfokus pada rentang waktu tersebut sehingga hasil yang diperoleh akan maksimal.

Berdasarkan data www.bi.go.id pada tahun 2009-2011 populasi perusahaan perbankan sebanyak 154 bank terdaftar. 64 di antaranya adalah nama satu bank yang sudah berubah atau mengalami merger tetapi masih terdata di website Bank Indonesia. 60 perusahaan yang terdata tidak memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian, dikarenakan tidak memiliki kelengkapan dari batasan

penelitian ini. Maka setelah proses penyaringan tersebut terdapat 30 perusahaan Bank yang dapat dijadikan sampel penelitian yang terdiri dari 3 Bank PERSERO, 22 BUSN Devisa, 3 BUSN non Devisa, 1 BPD, dan 1 Bank Campuran.

Tabel 3.1
Pemilihan Sampel Penelitian

NO	KETERANGAN	DATA	TOLAK
1	Perusahaan perbankan <i>go public</i> yang terdaftar di Bank Indonesia selama periode 2009-2011.	154	0
2	Masih beroperasi hingga tahun 2011	154	64
3	Bank mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) untuk periode 31 Desember 2009-2011 di dalam website Bank Indonesia	90	60
4	Perusahaan yang mengungkapkan informasi mengenai <i>corporate governance</i> , struktur kepemilikan, rasio keuangan, dan auditor eksternal dalam laporannya	30	0

Sumber : <http://www.bi.go.id/> & <http://www.icmd.co.id>

3.3 JENIS DAN SUMBER DATA

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan jenis data yang digunakan adalah kombinasi antara *time series* dan *cross section data*, yang disebut pooling data (Gujarati, 1991). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan perusahaan perbankan (*annual report*) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) selama periode tahun 2009- 2011, atau dapat dilihat pada situs resminya yaitu www.bi.go.id, website Bank Indonesia serta *Indonesian Capital Market Directory (ICMD)* periode 2009-2011.

3.4 METODE PENGUMPULAN DATA

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah metode dokumenter yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari catatan-catatan atau dokumen perusahaan (data sekunder) serta studi pustaka dari berbagai literatur dan sumber- sumber lainnya yang berhubungan dengan *good corporate governance*. Data sekunder berisi tentang data-data *annual report* yang mencakup data *corporate governance*, komposisi struktur kepemilikan, auditor eksternal dan rasio keuangan periode tahun 2009-2011. Pemilihan data tahun 2009-2011 dikarenakan adanya beberapa peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia mulai tahun 2006 mengenai penerapan *Good Corporate Governanve* bagi bank umum yakni Ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang penerapan GCG bagi bank umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

3.5 METODE ANALISIS DATA

Data Statistik

Model Penelitian

Penelitian ini mengasumsikan hubungan langsung antara mekanisme pemantauan *corporate governance* sebagai variabel independen dengan proxy untuk pengukurannya, dan kinerja perusahaan perbankan sebagai variable dependen dengan ROA sebagai proxy. Penelitian menggunakan *Ordinary Least Square (OLS) Regression Model*.

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan variabel-variabel dalam penelitian. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini mencakup nilai rata-rata (*mean*), deviasi standar, minimum, dan maksimum.

Mean digunakan untuk menghitung rata-rata variabel yang dianalisis. Maksimum digunakan untuk mengetahui jumlah atribut paling banyak yang diungkapkan di sektor perbankan. Analisis deskriptif ini tidak bertujuan untuk pengujian hipotesis (Azwar, 1998 dalam Oktapiyani, 2009).

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi berganda, harus dilakukan uji klasik terlebih dahulu. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar variabel penelitian yang ada dalam model regresi. Pengujian yang digunakan adalah uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas dan uji normalitas.

a. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel bebas (independen) pada model regresi. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Multikolinearitas dapat diketahui dengan cara menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Selain itu juga dapat diketahui melalui nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF) yang dihasilkan oleh variabel-variabel independen (Gozali,2005).

b. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan uji Durbin Watson (*DW test*). Uji DW dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai taksiran faktor gangguan yang berurutan. Kriteria pengujian dengan hipotesis tidak ada autokorelasi adalah sebagai berikut:

- i. Tidak terjadi autokorelasi positif
Jika $d < d_u$ = hipotesis ditolak
 $d > d_l$ = hipotesis diterima
 $d_l < d < d_u$ = tidak ada kesimpulan
- ii. Tidak terjadi autokorelasi negative
Jika $d > 4 - d_l$ = hipotesis ditolak
 $d < 4 - d_u$ = hipotesis diterima
 $4 - d_u < d < 4 - d_l$ = tidak ada kesimpulan
- iii. Tidak terjadi autokorelasi positif dan negative
Jika $d < d_l$ = hipotesis ditolak
 $d > 4 - d_l$ = hipotesis ditolak
 $d_u < d < 4 - d_u$ = hipotesis diterima
 $4 - d_u < d < 4 - d_l$ = tidak ada kesimpulan

Keterangan:

d = nilai DW hasil perhitungan

d_u = batas atas

d_l = batas bawah

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Salah satu cara untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara variabel dependen (terikat) dengan residualnya. Apabila grafik yang ditunjukkan dengan titik-titik tersebut membentuk suatu pola tertentu, maka telah terjadi heteroskedastisitas dan apabila polanya acak serta tersebar, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Selain itu heteroskedastisitas juga dapat diketahui melalui uji Park maupun Uji Glejser (*Glejser Test*), yaitu dengan melakukan analisis regresi variabel independen terhadap nilai absolute residual (Gozali,2005). Dalam uji Glejser yaitu jika tingkat signifikansi diatas 5 persen atau jika $t \text{ hitung} > t \text{ table}$, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun bila tingkat signifikansi dibawah 5 persen atau $t \text{ hitung} < t \text{ table}$, maka ada gejala heteroskedastisitas.

d. Uji Normalitas

Uji normalitas adalah pengujian mengenai kenormalan distribusi data. Uji ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara yang digunakan untuk mendeteksi apakah residual terdistribusi normal atau tidak adalah dengan analisis grafik histogram serta uji statistik non-parametrik yaitu *One Sample Kolmogorov Smirnov Test (1-Sample K-S)*.

3.5.3 Analisis Regresi

Dalam pengolahan data peneliti menggunakan alat bantu berupa perangkat lunak statistik (*statistic software*) yang dikenal dengan SPSS. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan metode penggabungan (*pooling data*) merupakan model yang diperoleh dengan mengkombinasikan atau mengumpulkan semua data *cross section* dan data *time series*. Model data ini kemudian diestimasi dengan menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*. Analisis regresi linear berganda dapat menjelaskan pengaruh antara variabel terikat dengan beberapa variabel bebas. *Pooling data* atau data panel dilakukan dengan cara menjumlahkan perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria selama periode pengamatan.

Persamaan regresi tersebut adalah sebagai berikut :

$$CP_{ik} = \alpha + \beta_1 OWN_{it} + \beta_2 FOR_{it} + \beta_3 GOV_{it} + \beta_4 BOD_{it} + \beta_5 BOC_{it} + \beta_6 INDB_{it} + \beta_7 CAR_{it} + \beta_8 BIG4_{it} + \beta_9 SIZE_{it} + e_k$$

untuk i menunjukkan time = 1, 2, ...,n, dan $k = 1,2,\dots,$

Keterangan:

K	=	Banking Firms
CP	=	Corporate performance measured by ROA
BOD	=	Board of Direction
BOC	=	Board of Commissioner Size in bank t
INDB	=	Number of Independent Commissioner in bank
CAR	=	Capital Adequacy Ratio
E	=	Random error
β_i	=	Parameters to be estimated
α	=	Konstanta

3.5.4 Pengujian Hipotesis

Menilai Goodness of Fit Suatu Model

Untuk melakukan pengujian hipotesis dilakukan dengan uji ketepatan perkiraan untuk mengetahui seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *Goodness of fit*-nya. Secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai koefisien determinasi, nilai statistik F dan nilai statistik t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak. Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima (Ghozali, 2009).

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relative rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2009).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka (R^2) pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted (R^2) pada saat mengevaluasi mana model regresi yang terbaik. Nilai adjusted (R^2) dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambah ke dalam model (Ghozali, 2009).

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Hipotesis nol adalah joint hipotesis bahwa $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ secara simultan sama dengan nol (Ghozali, 2009).

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$$

Pengujian hipotesis ini sering disebut pengujian signifikansi keseluruhan (overall significance) terhadap garis regresi yang ingin menguji apakah Y secara linear berhubungan dengan kedua X1 dan X2. Joint hipotesis dapat diuji dengan teknis analisis variance (ANOVA).

Pengambilan Keputusan:

Misalkan model regresi dengan k-variabel

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \mu_i$$

Hipotesis Nol $H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_k = 0$

(semua koefisien slope secara simultan sama dengan nol)

HA: tidak semua koefisien slope secara simultan sama dengan nol

Hitung nilai F statistic dengan rumus :

$$= \frac{df/(k-1)}{df/(n-k)} = \frac{df/(k-1)}{df/(n-k)}$$

Jika F hitung > F table yaitu F table yaitu $F_{\alpha}(k-1, n-k)$, maka hipotesis nol ditolak. Dimana $F_{\alpha}(k-1, n-k)$ adalah nilai kritis F pada tingkat signifikansi α dan derajat bebas (df) pembilang (k-1) serta derajat bebas (df) penyebut (n-k).

Terdapat hubungan yang erat antara koefisien determinasi (R^2) dan Nilai F test. Secara matematis nilai F dapat juga dinyatakan dalam rumus seperti di bawah ini:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Berdasarkan rumus ini dapat disimpulkan jika $R^2 = 0$, maka F juga sama dengan nol. Semakin besar nilai R^2 , makin besar pula nilai F. Namun demikian jika $R^2 = 1$, maka F menjadi tak terhingga. Jadi dapat disimpulkan uji F statistic yang mengukur signifikansi secara keseluruhan dari garis regresi dapat juga digunakan untuk menguji signifikansi dari R^2 . Dengan kata lain pengujian F statistik sama dengan pengujian terhadap nilai R^2 sama dengan nol.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hipotesis nol (H_0) yang hendak diuji adalah apakah suatu parameter (b_i) sama dengan nol, atau:

$$H_0 : b_i = 0$$

Artinya adalah apakah suatu variabel independen bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis alternatifnya (H_A) parameter suatu variabel tidak sama dengan nol, atau:

$$H_A : b_i \neq 0$$

Artinya variabel tersebut merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.

Cara melakukan uji t adalah sebagai berikut:

- A. Quick look : bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan $b_i = 0$ dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut), dengan kata lain menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen
- B. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut table. Kriteria pengujian signifikansi koefisien regresi sebagai berikut:

1. H0 diterima dan Hi ditolak apabila **t hitung < t table**, dengan demikian secara individu tidak ada pengaruh yang signifikan dari X1,X2,X3 terhadap Y.
2. H0 ditolak dan Hi diterima apabila **t hitung > t table**, dengan demikian secara individu ada pengaruh yang signifikan dari X1,X2,X3 terhadap Y

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) dan mempublikasikan laporan tahunannya pada website Bank Indonesia (BI) www.bi.co.id secara konsisten dari tahun 2009-2011. Kriteria yang digunakan dalam penelitian sampel adalah bank yang melakukan pengungkapan informasi mengenai struktur kepemilikan, *corporate governance* yang meliputi : Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komisaris Independen, CAR, dan ROA dalam Laporan Keuangannya. Berdasarkan dari data BI pada tahun 2009 s/d 2011 terdaftar populasi perusahaan perbankan sebanyak 154, namun berdasarkan kriteria sampel diatas maka dalam penelitian ini hanya digunakan sampel sebanyak 90 (berasal dari 30 nama perusahaan perbankan di Indonesia)

TABEL 4.1

**Daftar Perusahaan Perbankan yang menjadi Sampel Penelitian.
Periode 2009-2011**

NO	KODE	NAMA BANK
I		Bank Persero
1	BBNI	PT. Bank Negara Indonesia
2	BBRI	PT. Bank Rakyat Indonesia
3	BMRI	PT. MANDIRI
II		BUSN Devisa
4	INPC	PT Bank ARTHA GRAHA INTERNASIONAL
5	BBKP	PT Bank BUKOPIN
6	BNBA	PT Bank BUMI ARTA
7	BBCA	PT Bank Central Asia
8	BNGA	PT Bank CIMB NIAGA
9	BDMN	PT Bank DANAMON INDONESIA

10	BAEK	PT Bank EKONOMI RAHARJA
11	SDRA	PT Bank Himpunan Saudara 1906
12	ICBBP	PT ICB Bumi Putra
13	BNII	PT Bank Internasiaonal Indonesia
14	LIPPO	PT Bank LIPPO
15	MAYA	PT Bank MAYAPADA INTERNASIONAL
16	MEGA	PT Bank MEGA
17	BCIC	PT Bank MUTIARA
18	BBNP	PT Bank NUSANTARA PARAHIANGAN
19	NISP	PT Bank OCB NISP
20	BSWD	PT Bank OF INDIA INDONESIA
21	BNLI	PT Bank PERMATA
22	BSIM	PT Bank SINARMAS
23	MCOR	PT Bank WINDU KENTJANA INTERNASIONAL
24	PNBN	PT PAN INDONESIA BANK
25	BKSW	PT QWB BANK KESAWAN
III		BUSN Non Devisa
26	BEKS	PT Bank Pundi Indonesia
27	BTPN	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
28	BVIC	PT Bank Victoria Internasional
IV		BPD
29	BJBR	PT BPD Jawabaratan dan Banten
V		Campuran
30	BACA	PT Bank Capital Indonesia

Sumber : www.idx.co.id (situs Bursa Efek Indonesia) dan www.bi.go.id (situs official website of Bank Indonesia).

4.2 ANALISIS DATA

TABEL 4.2
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Variabel ROA (Y)	30	-.85	.61	.1777	.23390
Variabel Dewan Direksi (X1)	30	.10	.93	.4742	.24282
Variabel Dewan Komisaris (X2)	30	.27	.87	.4912	.17768
Variabel Komisaris Independen (X3)	30	.39	.83	.5745	.09057
Variabel CAR (X4)	30	.23	.74	.4766	.15662
Valid N (listwise)	30				

Sumber: data yang telah diolah.

Variabel Dewan Direksi (X1) mempunyai rentang 1.0 sampai 9.3 dengan rata-rata sebesar 4.742. X1 merupakan jumlah Dewan Direksi yang berada pada perusahaan bank. Semakin tinggi X1, menunjukkan ukuran perusahaan semakin besar dan kompleks.

Variabel Dewan Komisaris (X2) mempunyai rentang 2.67 sampai 8.67 dengan rata-rata sebesar 4.9120. Besarnya X2 menunjukkan jumlah Dewan Komisaris yang berada pada perusahaan Perbankan. Bank yang memiliki ukuran besar biasanya akan memiliki masalah keagenan yang lebih besar pula (karena sulit dimonitor) sehingga diperlukan fungsi pengawasan yang lebih banyak dengan menambah jumlah Dewan Komisaris.

Variabel Komisaris Independen (X3) mempunyai rentang 3.9 sampai 8.3 dengan rata-rata sebesar 5.745. Besar Komisaris Independen menunjukkan jumlah prosentase komisaris independen terhadap jumlah dewan komisaris yang berada pada perusahaan bank.

Variabel CAR (X4) mempunyai rentang 2.33 sampai 7.44 dengan rata-rata sebesar 2.7653. CAR merupakan rasio untuk mengukur proporsi modal sendiri dibandingkan dengan dana luar dalam pembiayaan kegiatan usaha perbankan. Semakin besar rasio tersebut, maka semakin baik posisi modal sebuah bank.

Variabel ROA (Y) mempunyai rentang -0.09 sampai 0.06 dengan rata-rata sebesar 0.0178. ROA merupakan rasio laba sebelum pajak (Earning Before Tax) dibagi dengan total aktiva. Semakin tinggi nilai ROA menunjukkan manajemen efisien dalam menggunakan penghasilan.

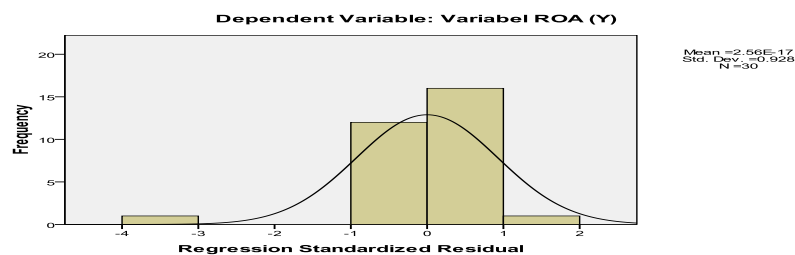
4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat apakah data penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan persamaan regresi linier berganda. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokolerasi. Model regresi yang baik adalah model yang lolos dari uji asumsi klasik tersebut (Imam Ghozali, 2009).

4.2.2.1 Uji Normalitas

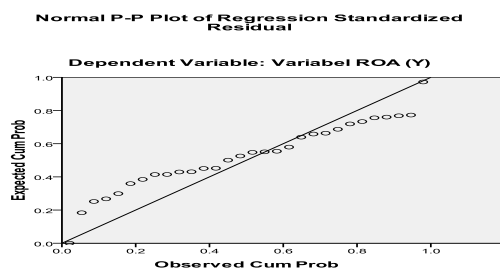
Model regresi yang baik mensyaratkan adanya normalitas pada data penelitian atau pada nilai residualnya bukan pada masing-masing variabelnya. Uji normalitas model regresi dalam penelitian ini menggunakan analisis grafik dengan melihat histogram dan normal *probbability plot*. Apabila *ploting* data membentuk satu garis lurus diagonal maka distribusi data adalah normal. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan diagram.

Gambar 4.1
Histogram



Sumber: data yang telah diolah.

Gambar 4.2



Sumber: data yang telah diolah.

Pada tampilan grafik histogram terlihat bahwa grafik memberikan pola distribusi normal. Sedangkan pada grafik normal P Plot menunjukkan bahwa titik-titik pada grafik telah mendekati sumbu diagonalnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa residual telah terdistribusi secara normal. Untuk memperkuat hasil tersebut maka dilakukan uji Kolmogorov – Smirnov. Hasilnya sebagai berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
		Variabel ROA (Y)	Variabel Dewan Direksi (X1)	Variabel Dewan Komisaris (X2)	Variabel Komisaris Independen (X3)	Variabel CAR (X4)
N		30	30	30	30	30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.1777	.4742	.4912	.5745	.4766
	Std. Deviation	.23390	.24282	.17768	.09057	.15662
Most Extreme Differences	Absolute	.207	.133	.158	.111	.110
	Positive	.134	.133	.158	.110	.096
	Negative	-.207	-.098	-.104	-.111	-.110
Kolmogorov-Smirnov Z		1.136	.729	.864	.607	.605
Asymp. Sig. (2-tailed)		.151	.662	.444	.854	.858

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: data yang telah diolah

Tabel 4.5 menunjukkan besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov (KS) per variabel.

- Untuk Variabel Dewan Direksi (X1) dengan nilai KS 0.729 dan signifikansi pada 0.662 (> 0.05),
- Untuk Variabel Dewan Komisaris (X2) dengan nilai KS 0,864 dan signifikan pada 0.444 (>0.05),
- Untuk Variabel Komisaris Independen (X3) dengan nilai KS 0.607 dan nilai signifikan 0.854 (>0.05),
- Untuk Variabel CAR (X4) dengan nilai KS 0.605 dan signifikan 0.858 (>0.05),

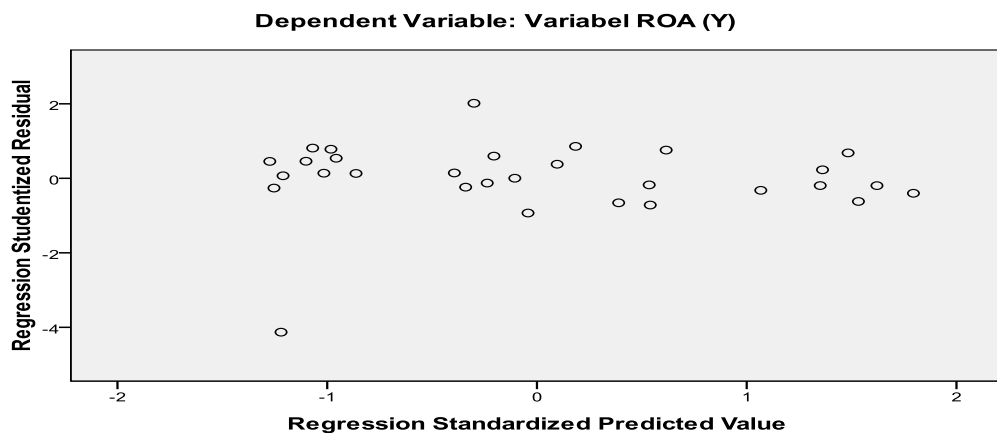
- Dan untuk Variabel ROA (X5) dengan nilai KS 1.135 dan nilai signifikan 0.151 ($0 > 0.05$) Yang menunjukkan nilai residual telah terdistribusi secara normal yang mendukung uji normalitas dengan grafik.

4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas dilakukan dengan plot grafik antara ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residual) pada Gambar 3. Terlihat pada grafik scatterplots bahwa titik-titik tidak menyebar secara acak disekitar titik 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terjadi heteroskedastisitas regresi.

Menurut Imam Ghozali (2009), untuk mengobati terhadap pelanggaran asumsi klasik ini, maka model regresi dapat diubah dalam bentuk semilog atau doublelog. Untuk mengobati terhadap pelanggaran asumsi klasik ini, model regresi kita ubah menjadi Logaritma natural (Ln) dan variabel tetap sehingga terlihat Gambar 4.4.

Gambar 4.3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot

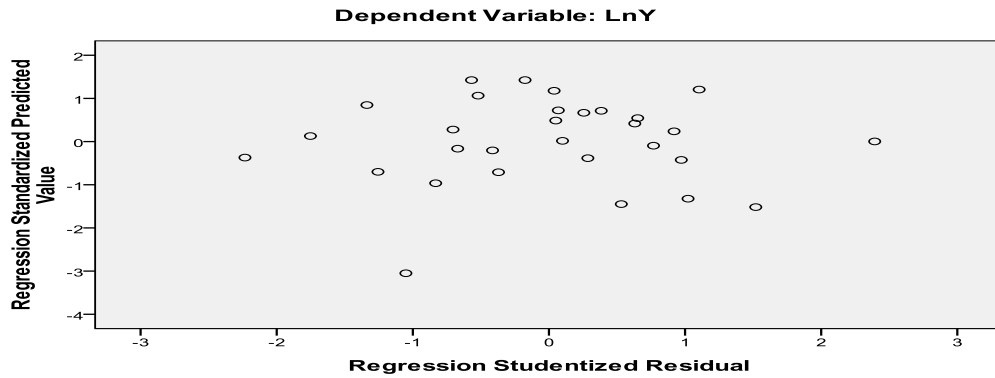


Sumber: data yang telah diolah.

Gambar 4.4

Hasil Uji Heteroskedastisitas Menggunakan Semi-log.

Scatterplot



Sumber: data yang telah diolah.

4.2.2.3 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinear dalam penelitian ini dengan melihat koefisien *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance* diatas 0,1. Berikut adalah uji multikolinearitas dalam penelitian ini.

Tabel 6
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Variabel Dewan Direksi (X1)	.909	1.100
	Variabel Dewan Komisaris (X2)	.136	7.332
	Variabel Komisaris Independen (X3)	.909	1.100
	Variabel CAR (X4)	.136	7.371

a. Dependent Variable: Variabel ROA (Y)

Sumber: data yang telah diolah

Berdasarkan pada nilai Tolerance dan VIF terlihat bahwa tidak ada nilai Tolerance dibawah 0.10 (nilai tolerance berkisar antara 0.136 sampai 0.909) begitu juga dengan nilai VIF tidak ada yang diatas 10 (nilai VIF berkisar antara 1.100 antara 7.371). jadi dapat disimpulkan model terbebas dari gangguan multikolinearitas.

4.2.2.4 Uji Autokolerasi

Uji Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Salah satu cara untuk mengetahui ada atau tidaknya autokolerasi adalah dengan uji Durbin Watson (*DW test*). Berikut adalah uji autokolerasi dalam penelitian ini.

Tabel 4.5

Model Summary^a

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.329 ^a	.108	-.035	.23792	2.175

a. Predictors: (Constant), Variabel CAR (X4), Variabel Dewan Direksi (X1), Variabel Komisaris Independen (X3), Variabel Dewan Komisaris (X2)

b. Dependent Variable: Variabel ROA (Y)

Sumber : Data yang sudah diolah

Uji DW pada Model Summary, terlihat nilai DW sebesar 2.175 nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, jumlah sampel 30, jumlah variabel bebas 4, maka di tabel DW akan didapat nilai sebagai berikut:

Tabel 4.6
Tabel Durbin Watson Test Bound

K=4		
N	DI	du
12	0.512	2.177
15	0.685	1.997
20	0.894	1.828
25	1.038	1.739
30	1.143	1.654

Sumber : Tabel 13 DURBIN-WATSON d STATISTIC:SIGNIFICANCE POINTS FOR d_L AND d_U AT 0.05 LEVEL OF SIGNIFICANCE

Oleh karena nilai DW 2.175 lebih besar dari pada batas atas (du) 1.651 dan kurang dari $4 - 1.651$ ($4 - d_u$), maka dapat disimpulkan bahwa kita tidak bisa menolak H_0 yang menyatakan bahwa tidak ada autokolerasi positif atau negatif (pada tabel keputusan) atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokolerasi.

4.2.3 Analisis Regresi Linier Berganda.

Dari uji asumsi klasik diatas dapat disimpulkan bahwa data yang ada terdistribusi secara normal serta tidak terdapat multikolinearitas, heteroskedasititas dan autokolerasi, sehingga memenuhi persyaratan untuk melakukan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis.

4.2.3.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Selain untuk menguji hipotesis, analisis regresi berganda juga digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen serta untuk mengukur koefisien determinasi model penelitian.

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen, maka digunakanlah koefisien determinasi. Dalam penelitian ini, nilai koefisien determinasi yang dipakai adalah nilai *adjusted R square*. Tabel berikut ini menyajikan nilai koefisien determinasi dari model penelitian.

Tabel 4.7

Nilai R dan Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.329 ^a	.108	-.035	.23792	2.175

a. Predictors: (Constant), Variabel CAR (X4), Variabel Dewan Direksi (X1), Variabel Komisaris Independen (X3), Variabel Dewan Komisaris (X2)

b. Dependent Variable: Variabel ROA (Y)

Sumber : Data yang telah diolah

Tabel 9 menunjukkan bahwa nilai adjusted R² adalah sebesar -0.035. Yang dapat diartikan variabel bebas dalam penelitian ini mampu menjelaskan varians ROA sebesar 35% dimana selebihnya yaitu sebesar 75% dijelaskan oleh faktor-faktor diluar variabel-variabel tersebut. *Standar Error of Estimate* (SEE) menunjukkan nilai 0.23792, hal ini menunjukkan nilai yang kecil sehingga dapat disimpulkan model regresi layak digunakan untuk memprediksi variabel dependen. Sementara nilai R sebesar 0.329 menunjukkan hubungan antara variabel dependen yaitu ROA dengan variabel independen yaitu Variabel Dewan Direksi, Variabel Dewan Komisaris, Variabel Komisaris Independen, dan Variabel CAR.

4.2.3.2 Uji Signifikan Simultan (Uji-F)

Setelah dilakukan pengujian untuk Koefisien Determinasi, maka akan dilakukan pengujian apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji yang dilakukan adalah dengan Uji-F. Berikut ini merupakan hasil perhitungan Uji-F.

Tabel 4.8
Hasil Uji-F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.171	4	.043	.757	.000
	Residual	1.415	25	.057		
	Total	1.587	29			

a. Predictors: (Constant), Variabel CAR (X4), Variabel Dewan Direksi (X1), Variabel Komisaris Independen (X3), Variabel Dewan Komisaris (X2)

b. Dependent Variable: Variabel ROA (Y)

Sumber : Data yang telah diolah

Tabel 10 menunjukkan bahwa F hitung adalah sebesar 0.757 dengan taraf signifikansi sebesar 0.000 ($<0,05$). Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel bebas dalam penelitian ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap ROA.

4.2.3.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji-t)

Uji-t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelasan/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Tampilan output SPSS uji-t dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 11
Output persamaan Regresi

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.088	.364		.242	.000
	Variabel Dewan Direksi (X1)	-.031	.191	-.032	-.164	.871
	Variabel Dewan Komisaris (X2)	.119	.673	.090	.176	.008
	Variabel Komisaris Independen (X3)	-.182	.512	-.071	-.356	.000
	Variabel CAR (X4)	.316	.766	.212	.413	.002

a. Dependent Variable: Variabel ROA (Y)

Sumber : Data yang telah diolah

Berdasarkan hasil uji regresi statistik-t pada tabel 11, terlihat bahwa Variabel Dewan Komisaris, Variabel Komisaris Independen, dan Variabel CAR menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap Variabel dependennya dengan taraf signifikansi 5%. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikan untuk VDK, VKI, VCAR yang masing-masing sebesar 0.008;0.000;0.002 (sig. <0.05). sedangkan untuk Variabel Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap variabel ROA karena probabilitas jauh diatas 5%. Hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas signifikan untuk VDD sebesar 0.871 (sig.>0.05).

Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat koefisien untuk persamaan regresi dari penelitian ini, yang dapat disusun dalam persamaan matematis sebagai berikut:

$$ROA_{it} = 0.088 + 0.119. X_{2it} - 0.182.X_{3it} + 0.316.X_{4it} + ek$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Angka Konstanta 0.088 menunjukkan bahwa rasio ROA akan bernilai 0.088 jika semua variabel independennya dianggap konstan.
2. Variabel Dewan Komisaris (X2) memiliki nilai koefisien positif sebesar 0.119. nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa X2 berpengaruh positif terhadap kinerja bank (ROA). Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel dewan komisaris naik satu satuan, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menaikkan kinerja bank (ROA) sebesar 0.088 (8,8%).
3. Variabel Komisaris Independen (X3) memiliki nilai koefisien negatif sebesar 0.182. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa X3 berpengaruh negatif terhadap kinerja Bank (ROA). Hal ini menggambarkan bahwa jika Variabel komisaris independen (X3) naik satu satuan, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan menurunkan kinerja bank (ROA) sebesar 0.182 (18,2%).
4. Variabel CAR (X4) memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0.316. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap kinerja bank (ROA). Hal ini menggambarkan bahwa jika variabel rasio pemodal CAR naik satu satuan, dengan asumsi variabel

lain tetap maka akan menaikkan kinerja Bank (ROA) sebesar 0.316 (31,6%).

4.2.3.4 Pengujian Hipotesis

1. Hipotesis Pertama (H_1)

Hipotesis pertama H_1 menyatakan bahwa Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja perbankan.

Nilai t hitung sebesar -0.164 dan t tabel 1,699. Karena t hitung lebih kecil dari pada t tabel maka seharusnya H_0 diterima, akan tetapi dikarenakan nilai signifikasinya melebihi 5persen yaitu 0,871 artinya tidak ada pengaruh signifikan antara ukuran dewan direksi terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut dapat pula dinilai sebagai H_0 yang menyatakan bahwa X_1 berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan adalah ditolak .

Dari hasil pengujian diperoleh bahwa hipotesis pertama menyatakan bahwa Variabel Dewan Direksi (X_1) berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan adalah ditolak. Ini karena hasil pengujian menyatakan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perbankan.

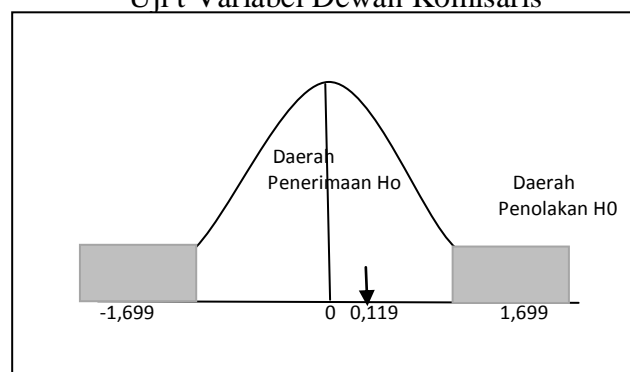
2. Hipotesis Kedua (H_2)

Hipotesis kedua (H_2) menyatakan bahwa Variabel Dewan Komisaris (X_2) berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa pada taraf signifikansi level 5 persen. Nilai t hitung sebesar

0.176 dan t tabel sebesar 1,699. Karena t hitung lebih besar dari pada t tabel maka H_0 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Dewan komisaris terhadap kinerja perbankan. Hal tersebut dapat pula dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,008 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05.

Koefisien regresi variabel X2 terhadap kinerja ROA sebesar 0,119 yang artinya pengaruh ukuran dewan Komisaris (X2) terhadap kinerja perbankan adalah positif. Ini berarti, setiap kenaikan satu satuan Variabel Dewan Komisaris akan menunjukkan kinerja ROA sebesar 0,119 (11,9%). Dari hasil pengujian diperoleh bahwa hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Variabel Dewan Komisaris (X2) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan adalah diterima. Ini karena hasil pengujian menyatakan bahwa Variabel Dewan Komisaris mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan.

Gambar 4.6
Uji t Variabel Dewan Komisaris



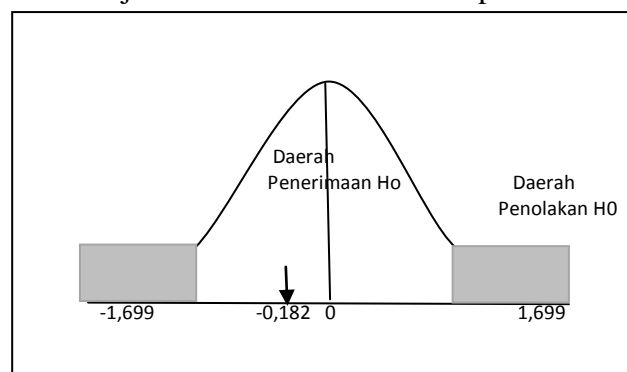
3. Hipotesis ketiga (H_3)

Hipotesis ketiga (H_3) menyatakan bahwa Variabel Komisaris Independen (X_3) berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan tabel 11

dapat dilihat bahwa taraf signifikansi level 5 persen. Nilai t hitung sebesar -0,356 dan t tabel sebesar 1,699. Karena t hitung lebih kecil dari pada t tabel maka H_0 diterima, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara Variabel Independen terhadap kinerja perbankan. Hal tersebut dapat pula dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05.

Koefisien regresi Variabel Komisaris Independen terhadap ROA sebesar -0,182 yang artinya pengaruh dewan komisaris independen (X_3) adalah negatif. Ini berarti, setiap kenaikan satu satuan komisaris independen akan menurunkan kinerja ROA sebesar 0,182 (18,2%). Dari hasil pengujian diperoleh bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen (X_3) berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan adalah diterima. Ini karena hasil pengujian menyatakan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan.

Gambar 4.7
Uji t Variabel Komisaris Independen



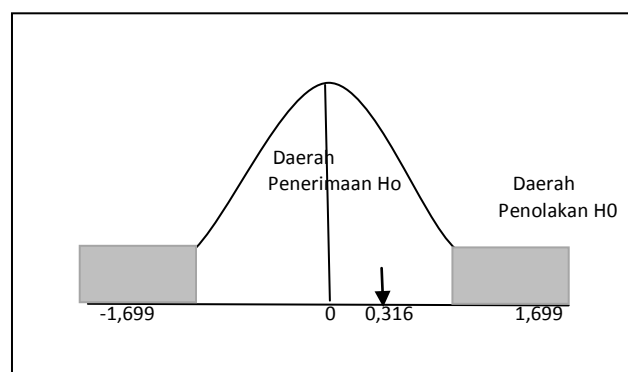
Sumber: Data yang sudah diolah

4. Hipotesis keempat (H_4)

Hipotesis keempat (H_4) menyatakan bahwa rasio kecukupan modal (CAR) berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan tabel 11 dapat dilihat bahwa pada taraf signifikansi level 5 persen. Nilai t hitung sebesar 0,413 dan t tabel sebesar 1,699. Karena t hitung lebih kecil dari pada t tabel maka H_0 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan antara rasio CAR terhadap kinerja perbankan. Hal tersebut dapat pula dilihat dari nilai signifikansi sebesar 0,002 yang lebih kecil dari taraf signifikansi yang ditentukan sebesar 0,05.

Koefisien regresi Variabel CAR terhadap kinerja ROA sebesar 0,316 yang artinya pengaruh CAR terhadap kinerja perbankan adalah positif. Ini berarti, setiap kenaikan satu persen rasio kecukupan modal (CAR) akan menaikkan kinerja perusahaan sebesar 0,316 (31,6%). Dari hasil pengujian diperoleh bahwa hipotesis keempat yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan adalah diterima.

Gambar 4.8
Uji t Variabel CAR



Sumber: Data yang sudah diolah

4.3 PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa hanya hipotesis pertama yang tidak terbukti. Bagian ini berisi pembahasan terperinci atas hasil pengujian masing-masing variabel dan hasil pengujian masing-masing variabel dan pengujian determinasinya.

4.3.1 Variabel Dewan Direksi (X1).

Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa variabel X1 berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai $t = -0.164$ dan $p = 0.871$ ($p > 0.05$). hasil penelitian ini mendukung teori yang ada bahwa peningkatan ukuran dan diversitas dari Dewan Direksi berpengaruh terhadap kinerja bank karena akan memberi manfaat bagi perusahaan karena terciptanya *network* dengan pihak luar perusahaan dan menjamin ketersediaan sumber daya (Pfefer, 1973; Pearce & Zahra, 1992 dalam Faisal, 2005).

Temuan ini mendukung hasil penelitian Suranta dan Machfoedz (2003). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan ukuran dewan direksi dan nilai perusahaan adalah linier dan positif berarti bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh ukuran dewan direksi namun tidak signifikan.

Variabel Dewan Komisaris (X2)

Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa variabel X2 berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai $t = 0.176$ dan $p = 0.871$ ($p > 0.05$). Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang ada bahwa ukuran dewan komisaris menentukan tingkat keefektifan pantauan kinerja bank.

Temuan ini mendukung hasil penelitian Jensen & Eisenberg *et.al* (dalam Faisal, 2005) menyatakan dewan komisaris yang ukurannya besar kurang efektif dari pada dewan komisaris yang ukurannya kecil. Jumlah dewan komisaris yang kecil akan meningkatkan kinerja perusahaan.

4.3.3 Variabel Komisaris Independen (X3)

Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa variabel X3 berpengaruh negatif terhadap kinerja perbankan. Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai $t = -0.355$ dan $p = 0.000$ ($p < 0.05$). Hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang ada bahwa proporsi dewan komisaris independen berhubungan positif dengan kinerja perusahaan (Wardhani, 2006).

Akan tetapi penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hexana Sri Lastanti (2004) meneliti hubungan striktur *corporate governance* dengan kinerja perusahaan dan reaksi pasar. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara independensi dewan komisaris dengan nilai perusahaan yang diukur dengan Tobin's Q. Sementara variabel

yang lain tidak berpengaruh secara signifikan, baik terhadap nilai perusahaan maupun kinerja perusahaan (yang diukur oleh ROA dan ROE)

4.3.4 Variabel Rasio Kecukupan Modal (CAR)X4

CAR merupakan suatu persyaratan cadangan rasio kecukupan modal yang ditetapkan pemerintah sebagai bentuk pemantauan (regulator) terhadap kinerja perbankan. Hasil pengujian statistik dengan uji-t menunjukkan bahwa variabel CAR berpengaruh negatif yang signifikan terhadap kinerja perbankan.

Berdasarkan hasil uji statistik didapatkan nilai $t = -0,413$ dan $p = 0.002$ ($p=0.002$).

Hasil penelitian ini mendukung teori yang ada yang berasal dari komite Basel menyiratkan bahwa pemantauan peraturan (regulator) yang dikeluarkan oleh bank, sentral atau pemerintah mempengaruhi kinerja perbankan terutama dalam profitabilitas, melalui persyaratan cadangan dan atau Rasio Kecukupan Modal (Brigham dan Erhardt, 2005).

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan mengenai pengaruh variabel dewan direksi (X1), Variabel Dewan Komisaris (X2), Variabel Komisaris Independen (X3), dan Variabel CAR (X4) terhadap kinerja perusahaan perbankan yang diproksikan melalui ROA, Maka peneliti dapat meringkas penemuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini cukup layak, karena lolos dari empat pengujian terhadap asumsi klasik, yaitu uji multikolinieritas, uji autokolerasi, uji heterodasitas dan uji normalitas.
2. Dari hasil pengujian hipotesis pertama, Variabel Dewan direksi (X1) secara statistik tidak signifikan terhadap ROA sebagai proksi kinerja perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi 0,871 ($>0,05$). Sedangkan nilai t hitung -

$0,164 < t$ tabel $1,699$ yang menunjukkan bahwa $X1$ memiliki pengaruh yang negatif tetapi tidak signifikan terhadap kinerja perbankan.

3. Dari hasil pengujian hipotesis ke dua, Variabel Dewan Komisaris ($X2$) secara statistik signifikan terhadap ROA sebagai proksi kinerja perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,008 < 0,05$). Sedangkan nilai t hitung $0,176 < t$ tabel $1,699$ yang menunjukkan bahwa $X2$ memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja perbankan.
4. Dari hasil pengujian hipotesis ke tiga, Variabel Komisaris Independen ($X3$) secara statistik signifikan terhadap ROA sebagai proksi kinerja perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. sedangkan nilai t hitung $-0,356 > t$ tabel $1,699$ yang menunjukkan bahwa $X3$ memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perbankan.
5. Dari hasil pengujian hipotesis ke empat, Variabel CAR/ rasio kecukupan modal ($X4$) secara statistik signifikan terhadap ROA sebagai proksi kinerja perusahaan. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,002 (< 0,05)$. Sedangkan nilai t hitung $(-0,413) < t$ tabel ($1,699$) yang menunjukkan bahwa $X4$ memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perbankan.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini secara keseluruhan diantaranya :

1. Mekanisme pemantauan kepemilikan menunjukkan hubungan yang tidak signifikan terhadap kinerja perbankan.
2. Mekanisme pemantauan pengendalian internal (Dewan Direksi) menunjukkan hubungan yang negatif dan signifikan.
3. Mekanisme Pemantauan Regulator melalui persyaratan cadangan atau Rasio Kecukupan Modal (CAR) menunjukkan hubungan yang negatif signifikan terhadap kinerja perbankan.

5.2 KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih luas dan baik.

1. Adanya ketidaksesuaian antara data yang didapat dari sumber ICMD (*Indonesian Capital Market Directory*) dengan *annual report* perusahaan yang dipublikasikan di BI (Bank Indonesia *website*). Ketidak sesuaian data tersebut terletak dari adanya beberapa nama bank yang masih terdaftar tetapi sebenarnya telah berubah nama atau telah dibubarkan, sehingga dalam penyelenggaraannya menimbulkan kesulitan dalam pengumpulan data. Sehingga penulis menggunakan data dari

sumber IDX untuk mengumpulkan data-data *annual report* tiap-tiap nama bank sampel.

2. Penelitian ini hanya mengkaji mekanisme pengawasan *internal corporate governance* terhadap reaksi pasar yang tercermin pada nilai perusahaan.
3. Pemilihan periode waktu yang relatif pendek mengakibatkan daya uji rendah sehingga tingkat keakurasian informasi masih relatif kecil.

5.3 SARAN

Berdasarkan beberapa keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, peneliti menyarankan bagi penelitian selanjutnya

1. Menggunakan data yang lebih luas lagi yang meliputi data *cross-section* dan *time series* supaya mendapatkan analisis data yang lebih akurat dan reliable.
2. Untuk *annual report* yang digunakan sebagai data dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar menggunakan periode yang lebih panjang agar mampu untuk mengakses efektifitas dan implikasi dari kebijakan yang berhubungan dengan mekanisme pemantauan *corporate governance* terhadap kinerja perusahaan terutama perusahaan perbankan.
3. Peneliti menyarankan kepada penelitian selanjutnya agar menggunakan lebih dari satu variabel dependen untuk mewakili proksi dari kinerja perusahaan, tidak hanya menggunakan ROA. Peneliti berharap penelitian selanjutnya lebih

komprehensif dalam menyajikan hasil penelitian yang lebih bermanfaat dibandingkan penelitian sebelumnya.

Adapun saran bagi pihak manajemen.

1. Untuk meningkatkan kinerja perbankan, diharapkan tidak hanya memperhatikan ukuran seberapa banyak kuantitas dewan direksi, dewan komisaris dan komisaris independen tetapi juga memperhatikan kompetensi yang dimiliki yang berhubungan dengan profesionalitas personal dalam bidangnya.
2. Perusahaan pun harus memperhatikan aspek kecukupan modal yang disyaratkan oleh pemerintah juga total asset yang dimiliki, karena setiap satu persentasi kenaikan jumlah CAR atau asset yang dimiliki perusahaan akan meningkatkan kinerja perbankan yang diukur dari segi profitabilitas keuangan dan posisi modal yang menjadi pertimbangan bagi investor dalam berinvestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal. 2005. "Hubungan Antara Corporate Governance dan Variabel Pengurang Masalah Agensi," *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol.1, No.10, Juni 2005, Hal. 39-55.
- Bai,C.,Q.Liu, J.Lu.,F.Song.,& J.Zhang, 2003, Corporate Governance and Market Valuation in China, *Working Paper*, University of Hongkong
- Bank for International Settlements, Basle Committee on Banking Supervision, (1998) *Framework for internal control systems in banking organisation*
- Bank Indonesia, 1998. Surat Keputusan Direksi Bank No.30/277/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Cara Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
- Bank Indonesia, 2000. Peraturan BI No.2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang Bank Umum.
- Bank Indonesia, 2007. Surat Edaran BI No 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 tentang Perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum.
- Bank Indonesia. 2003.Peraturan BI No 5/25/PBI/2003 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*)
- Bank Indonesia. 2006. Peraturan BI No 8/4/PBI/2006 tentang Penerapan GCG Bagi Bank Umum yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006

- Barth, James R., G. Caprio, Jr., and R. Levine. 2002. "Banking System Around the Globe : Do Regulation and Ownership Affect Performance and Stability?", February 2002.
- Beiner, S., W. Drobetz, F. Schmid dan H. Zimmermann, 2003. "Is Board Size An Independent Corporate Governance Mechanism?".
<http://www.wvz.inibaz.chllcofi/publications/papers/2003/06.03.pdf>
- Belkhir, Mohamed. 2005. Board Structure, Ownership Structure and Firm Performance: Evidence From Banking, Laboratoire Economic di Orleans available at: <http://ssrn.com>.
- Darmawati, Deni dkk.2005."Hubungan Corporate Governance, Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar," *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.8, No.1, Hal.65-81.
- Faisal, 2005,"Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan dan Mekanisme Corporate Governance, "*Jurnal Riset Akuntansi Indonesia*, Vol.8, No.2,Hal, 175-190.
- Firani, 2009. "MENJADI LEBIH BAIK DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PERBANKAN"
- Firmansyah, 2006. "Analisis Hubungan Struktur Kepemilikan Dengan Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan Persero dan Perusahaan Perbankan Swasta Nasional Go Publik. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. (Dipublikasikan)
- Ghozali, Imam, 2009. "EKONOMETRIKA", Semarang. 2009.
- Ghozali, Imam. 2005. Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gozali, Imam, 2006. "Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS", UNDIP, Semarang, 2006.

<http://www.idx.co.id/idid/beranda/perusahaantercatat/laporankeuangandantahunan.aspx>. diunduh tanggal 5/12/2012

Indonesian Corporate Governance Banking Watch, 5 April 2011 “Mengapa GCG bagi bank begitu penting?”

Lastanti, Hexana Sri. 2004. “Hubungan Struktur Corporate Governance dengan Kinerja Perusahaan dan Reaksi Pasar,” Konferensi Nasional Akuntansi: Peran Akuntan dalam Membangun Good Corporate Governance.

Levine, R.(2003), *The Corporate Governance of Banks*, Global Corporate Governance Forum, World Bank, Washington, DC.

Praptiningsih, Maria.2009. “Corporate Governance and Performance of Banking Firms:Evidence From Indonesia, Thailand, Philippines, and Malaysia”. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.11, No.1, pp.94-108

Prasisto Arif, 2009. “Statistik Menjadi Mudah Dengan SPSS 17”, ALFABETA, Jakarta, 2009.

Sari Nirmala. 2010. Skripsi “PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PERBANKAN NASIONAL”, Universitas Diponegoro, Semarang : <http://ssrn.com>

Sugiyono, 2007. “Metode Penelitian Bisnis” ALPABETA, Bandung, 2007.

Sukamulja, Sukmawati. 2004, “Good Corporate Governance di Sektor Keuangan: Dampak Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan”. Vol.8.No.1. Juni 2004. Hal 1-25.

Ujiyantho, Muh. Arief dan Bambang Agus Pramuka. 2007 “ MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE*, MANAJEMEN LABA DAN KINERJA KEUANGAN (Studi Pada Perusahaan go publik Sektor Manufaktur)” Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makasar, 26-27 juli 2007.

Wallace, P.& J.Zikin.2005. *Coorporate Governance Mastering Business in Asia*, Singapura: Jhon Wiley & Sons.

Wardhani, Ratna. 2006. “ Mekanisme Corporate Governance dalam Perusahaan yang Mengalami Masalah Keuangan (Financially Distressed Firms) ,”
Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang, 23-26 Agustus 2006.

Zulkifli, A.H. & F.A. Samad. 2007. Corporate Governance and Performance of Banking Firms: Evidence from Asian Emerging Markets, *Advances in Financial Economics*, Vol.12,p.49-74, Oxford:Elsevier.